STRATEGI PREVENTIF KEMENTERIAN LUAR NEGERI TERHADAP ISU PAPUA PADA TAHUN 2023

TUGAS AKHIR

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

SEKAR OCTA FRIANTI

20323178

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

STRATEGI PREVENTIF KEMENTERIAN LUAR NEGERI TERHADAP ISU PAPUA PADA TAHUN 2023

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

SEKAR OCTA FRIANTI

2024

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

STRATEGI PREVENTIF KEMENTERIAN LUAR NEGERI

TERHADAP ISU PAPUA PADA TAHUN 2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Laporan Praktik Lapangan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

Jumat, 12 Juli 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	**Tanda Tangan**
1.	Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.A.	
2.	Derina Faslig Silitonga, S. Hub. Int., M.H.I.	
3.	Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.	
4.	Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.	

Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan praktik lapangan ini adalah hasil penulisan independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 28 Juli 2023



Sekar Octa Frianti

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan 6
1.3.1 Tujuan Penelitian 6
1.3.2 Tujuan Kegiatan
1.4 Cakupan Penelitian 7
1.5 Manfaat 7
1.5.1 Manfaat bagi Mahasiswa 7
1.5.2 Manfaat bagi Program Studi 8
1.5.3 Manfaat bagi Instansi/Lokasi Praktik Lapangan 9
1.6 Tinjauan Pustaka 10
1.7 Kerangka Pemikiran 14
1.8 Metode Pelaksanaan Kegiatan 18
1.8.1 Jenis Kegiatan 18
1.8.2 Subjek dan Objek Kegiatan 19
1.8.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 19
1.8.4 Linimasa Pelaksanaan Kegiatan 20
1.9 Sistematika Penulisan 20
BAB II **22**
GAMBARAN UMUM INSTANSI/LOKASI PRAKTIK LAPANGAN **22**
2.1 Profil Instansi/Lokasi Kegiatan 22
2.1.1 Tugas dan Fungsi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 24
2.1.2 Tugas dan Fungsi BSKLN 26
2.1.3 Struktur Organisasi Instansi BSKLN 27

2.1.4 Tugas dan Fungsi Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data 29
2.2 Pelaksanaan Kegiatan Magang 31
2.2.1 Pengenalan Lingkungan Kerja Kementerian Luar Negeri RI 35
2.2.2 *Training*/Pelatihan 36
2.2.3 *Event* Coordinating 38
2.2.4 *Timeline* Kegiatan 42
BAB III 45
HASIL DAN PEMBAHASAN 45
3.1 Latar Belakang Konflik 45
3.2 Analisis Teori dan Konflik 47
3.2.1 Politik Domestik 47
3.2.2 Kapasitas Ekonomi dan Militer 49
3.2.3 Faktor Eksternal 50
3.3 Pengaruh Internasional yang Mendukung Gerakan Separatis Papua 50
3.3 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia *Act of Preventing* 56
BAB IV 61
PENUTUP 61
4.1. Kesimpulan 61
4.2 Rekomendasi 62
4.2.1 Rekomendasi dalam Proses Penelitian 62
4.2.2 Rekomendasi Kegiatan Praktik Kerja 63
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN 70

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Tabel 1.1 Mengenal Isi Pokok dari Keseluruhan Literatur *Review* 12

Tabel 1.2 Linimasa Pelaksanaan Kegiatan 20

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BSKLN 31

Gambar 1.2 Screenshot kegiatan Webinar Bincang Data "Papua Pasca Otsus 2021: *What is Our Next Agenda*?" 39

Gambar 1.3 dokumentasi kegiatan penerimaan diplomat ke Pusat SK IKAD bersama dengan Kepala BSKLN 40

Tabel 1.3 Timeline kegiatan praktik kerja 44

Tabel 1.4 Data-data yang dihimpun oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terkait pemetaan persebaran kelompok/aktor/negara simpatisan gerakan separatis Papua 59

GLOSARIUM

A

ABRI : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

B

BSKLN : Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri

F

FWPC : *Free West Papua Campaign*

K

KBRI : Kedutaan Besar Republik Indonesia

Kemlu RI : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

KJRI : Konsulat Jenderal Republik Indonesia

L

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

N

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

O

OPM : Organisasi Papua Merdeka

Otsus : Otonomi Khusus

S

SK IKAD : Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data

ABSTRAK

Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Republik Indonesia dalam membantu menjaga serta mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di mata dunia sedang menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam merumuskan suatu kebijakan terkait dengan isu separatisme yang ada di Papua. Melalui Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data (SK IKAD) membantu dalam mengumpulkan dan mengkaji data-data yang dikemas dalam bank data yang diperlukan dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri yang efektif yang diharapkan dapat membantu meredam konflik seperatisme yang ada di Papua.

Kata Kunci: BSKLN, SK IKAD, data, kebijakan luar negeri

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik kerja lapangan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan praktis profesional individu. Praktik kerja juga dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis yang sesuai dengan minat mereka di lapangan. Pengalaman, ilmu, dan kesempatan yang telah didapatkan dari praktik kerja lapangan yang dilakukan dapat diterapkan dan diaplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman langsung di lapangan memberikan pemahaman yang faktual dan komprehensif.

Dalam praktik kerja lapangan kali ini, penulis berkesempatan untuk dapat melaksanakan praktik kerja lapangan di Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri pada Februari hingga April 2023, di mana laporan praktik ini dibuat sebagai bagian dari program yang sudah dilaksanakan. Penulis juga berkesempatan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman praktis dan teoritis serta memperluas pengetahuan di bidang yang relevan dengan fokus studi penulis selama bergabung bersama BSKLN dengan program praktik kerja Kemlu RI. Selama bergabung dengan BSKLN, penulis juga mendapatkan bimbingan langsung dari para diplomat, ahli, dan staf yang ada di Kemlu RI. Berada dan terjun langsung dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri RI yang memiliki fokus pada isu-isu luar negeri dan merumuskan kebijakan luar negeri serta berinteraksi langsung dengan dunia luar merupakan impian

terbesar penulis yang sangat membantu dalam pengembangan kemampuan dan diri penulis sesuai dengan minat serta bidang studi penulis.

Selama bergabung bersama dengan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri, penulis berkesempatan untuk bergabung dan di tempatkan di Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data atau yang biasa dikenal sebagai Pusat SK IKAD. SK IKAD memiliki fokus pada kajian isu-isu khusus dan analisis data yang ada di BSKLN Kementerian Luar Negeri. Selama bergabung dengan SK IKAD, penulis berkesempatan untuk berdiskusi langsung bersama para diplomat dan data analis yang dimiliki oleh BSKLN Kementerian Luar Negeri membahas isu-isu yang sedang di terjadi saat ini serta belajar mengumpulkan data-data faktual yang nantinya dibutuhkan dan akan digunakan dalam pembentukan serta perumusan kebijakan luar negeri oleh Kementerian Luar Negeri RI.

Ada banyak kesempatan serta tugas-tugas yang penulis kerjakan bersama dengan rekan-rekan magang di dalam pusat SK IKAD antara lain, membantu membuat *policy brief* dari suatu isu, membantu membuat bank data terkait suatu itu, membuat serta menyajikan data-data penting yang dibutuhkan oleh para diplomat dari berbagai pusat hingga membahas isu-isu terkhusus yang relevan yang sedang dibahas oleh Kementerian Luar Negeri RI. Salah satu isu khusus yang sempat dibahas bersama yakni terkait dengan isu yang berada di Papua. Maraknya pembahasan mengenai isu di Papua terkait adanya organisasi yang mendukung pemisahan wilayah Papua dari kesatuan NKRI tidak hanya terdengar dalam negeri saja, namun

tersebar ke seluruh dunia yang menimbulkan berbagai macam reaksi dari seluruh penjuru dunia.

Adanya konflik separasi antara Papua dan Indonesia makin meningkat sejak runtuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998 di era presiden Soeharto, di mana gerakan dan aktivitas yang memperjuangkan serta menuntut adanya kemerdekaan wilayah Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana gerakan tersebut pun masih berlanjut hingga ke masa pemerintahan presiden-presiden selanjutnya hingga saat ini (Nainggolan 2014). Aksi-aksi militer yang menuntut kemerdekaan Papua dari wilayah NKRI dipimpin oleh suatu kelompok separatis yang sering terdengar namanya membuat kekacauan di wilayah Papua, dan kelompok tersebut adalah Organisasi Papua Merdeka atau yang biasa dikenal sebagai OPM. Aktivitas militer yang digerakkan oleh kelompok separatis OPM ini menimbulkan banyaknya kekhawatiran akan keamanan wilayah serta keselamatan warga negara yang tinggal di wilayah Papua. Tidak hanya itu, ada begitu banyak respon dari dunia internasional terkait dengan isu yang terjadi di Papua ini, termasuk adanya kampanye-kampanye kemerdekaan Papua yang sering kali mendapat dukungan dari berbagai pihak yang tersebar di seluruh dunia mulai dari lingkungan Pasifik Selatan hingga ke Eropa serta Amerika Serikat (Nainggolan 2014).

Meningkatnya gerakan separatis Papua dan banyaknya kampanye internasional serta kelompok atau bahkan negara yang mempertanyakan tentang kedaulatan bangsa Indonesia dalam menangani isu Papua yang tidak kunjung usai, membuat pemerintah saat ini harus mulai membenahi diri dan

memfokuskan agenda kebangsaannya untuk memajukan wilayah Papua dalam bentuk upaya mempertahankan NKRI. Karena banyaknya mata di dunia yang mulai menyoroti isu Papua maka muncullah istilah yang dikenal sebagai Internasionalisasi Papua. Internasionalisasi Papua sendiri merupakan buah dari kebijakan sekuritisasi Papua pada era pemerintahan Soeharto yang menekankan pada pendekatan keamanan yang berlebihan serta dikarenakan gagalnya pengaplikasian pendekatan kesejahteraan yang dilakukan melalui suatu kebijakan yang dikenal sebagai Kebijakan Otonomi Khusus atau Otsus yang dilakukan pada era reformasi (Nainggolan 2014).

Dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya dan hingga saat ini, Indonesia masih menanggung beban yang cukup besar dalam mengembalikan serta memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi wilayah Papua. Mengingat pula banyaknya pengaruh-pengaruh dunia internasional yang mendukung adanya kemerdekaan Papua, menuntut Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan diplomasi serta kinerjanya sejak pemerintahan Megawati dalam menangani isu-isu separatis yang hingga saat ini masih ada di Papua. Diplomasi menjadi salah satu senjata bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Diplomasi sendiri dapat disebut sebagai kelanjutan atau langkah perlawanan yang lain (Clausewitz 1984). Perjuangan diplomasi dalam mempertahankan Papua selalu mengalami pasang dan surut yang mana hal ini sangat seiring dengan kondisi lapangan yang terjadi saat ini, mulai dari kapasitas aktor-aktor yang ada saat ini, seberapa banyaknya dukungan para simpatisan separatis Papua yang menyumbang pengaruh besar dalam opini atau

pendapat internasional dalam pengambilan keputusan di meja musyawarah multilateral dalam membahas isu Papua.

Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus cerdas dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia tak hanya secara domestik namun dalam ranah internasional juga. Ada banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI dalam lingkup domestik, mulai dari meningkatkan pembangunan dan pemerataan wilayah yang ada di Papua, pemekaran wilayah yang ada di Papua, hingga penguatan militer di wilayah rawan di Papua. Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga tak henti-hentinya mengupayakan dan menyuarakan tentang kedaulatan NKRI dalam lingkup Internasional. Hal tersebut telah dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data di BSKLN Kementerian Luar Negeri, di mana Pusat SK IKAD menggelar webinar yang bertajuk **Bincang Data "Papua Pasca Otsus 2021: *What is Our Next Agenda*?"** pada 24 Februari 2023 melalui platform *Zoom Meeting* yang dihadiri oleh seluruh Kedutaan Besar Republik Indonesia di segala penjuru dunia untuk meningkatkan pemahaman serta menjaring masukan terkait peranan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri pasca Otonomi Khusus Papua dalam membantu meningkatkan pelaksanaan diplomasi kedaulatan Republik Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi preventif dan peranan Kementerian Luar Negeri melalui BSKLN dan Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data dalam membantu pemerintah menangani isu gerakan saparatis yang ada di Papua?

1.3 Tujuan Praktik Kerja

1.3.1 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari dari diadakannya praktik kerja lapangan di Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri ini adalah:

1. Untuk memberikan pengalaman faktual kepada penulis terkait pekerjaan seorang aktor Hubungan Internasional di Kementerian Luar Negeri sekaligus menambah wawasan terkait isu-isu luar negeri yang saat ini sedang dibahas dan dikerjakan oleh Kementerian Luar Negeri RI.
2. Untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang penulis dapatkan selama melakukan praktik kerja di Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data (SK IKAD), BSKLN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan strategi kebijakan luar negeri Kementerian Luar Negeri RI serta

pengalaman kerja dan praktik kerja yang dilakukan di BSKLN Kementerian Luar Negeri.

1.4 Cakupan Praktik Kerja

Adapun selama penulis melaksanakan praktik kerja yang dilaksanakan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari hingga April 2023 penulis berkesempatan dan ditempatkan pada Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data dimana penulis banyak berinteraksi dengan diplomat serta data analis yang berada di Pusat SK IKAD. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan tersebut, penulis banyak mendapatkan tugas membantu menghimpun data-data yang dibutuhkan dalam membantu merumuskan serta membuat suatu rekomendasi kebijakan, membuat policy brief, membahas isu-isu khusus yang saat itu sedang ditangani oleh Kementerian Luar Negeri termasuk isu separatisme yang ada di Papua. Selama melaksanakan praktik kerja di BSKLN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia penulis diminta untuk melaksanakan program praktik kerja secara hybrid yaitu WFH dan WFO sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan yang telah dibuat oleh Pusat SK-IKAD.

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat bagi Mahasiswa

Adapun manfaat yang dapat dirasakan oleh mahasiswa melalui praktik kerja lapangan di Kementerian Luar Negeri ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa terkait pekerjaan serta dinamika yang terjadi di dalam Kementerian Luar Negeri dalam proses pengambilan serta perumusan kebijakan terlebih dalam Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri RI
2. Untuk menambah wawasan serta pengalaman terkait dengan pengaplikasian Hubungan Internasional di dunia kerja
3. Untuk memberikan pengetahuan terkait perbandingan antara teori dan praktik yang telah mahasiswa pelajari di dalam kelas
4. Untuk menambah minat serta bakat mahasiswa untuk terjun menjadi aktor Hubungan Internasional di dunia pekerjaan.

1.5.2 Manfaat bagi Program Studi

Adapun manfaat yang dapat dirasakan oleh prodi melalui program praktik kerja lapangan ini, diantaranya adalah:

1. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan
2. Untuk mengembangkan pendidikan agar sesuai dengan keadaan lapangan yang ada pada saat ini
3. Untuk memperoleh masukan kompetensi agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan dunia Hubungan Internasional pada saat ini

4. Untuk mengembangkan mutu pendidikan melalui studi langsung yang dilakukan oleh mahasiswa
5. Untuk meningkatkan daya saing mahasiswa agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja karena memiliki kemampuan dan keterampilan yang relevan

1.5.3 Manfaat bagi Instansi/Lokasi Praktik Lapangan

Adapun manfaat yang dapat dirasakan oleh Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI dalam program praktik kerja lapangan ini diantaranya adalah:

1. BSKLN Kementerian Luar Negeri RI dapat melihat dan menilai kualitas pendidikan mahasiswa peserta praktik kerja lapangan
2. BSKLN Kementerian Luar Negeri dapat menjalin koneksi serta kerja sama bersama dengan Universitas serta program studi mahasiswa peserta praktik kerja lapangan terkait dengan berbagai isu dan hal yang sedang di bahas saat ini.
3. BSKLN Kementerian Luar Negeri RI dapat berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan para akademisi yang sedang melakukan praktik kerja lapangan
4. BSKLN Kementerian Luar Negeri RI dapat berdiskusi dan mendapat ide perspective dan inovasi yang baru dari mahasiswa peserta praktik kerja lapangan yang lebih paham akan perkembangan teknologi, konsep hingga tren saat ini.

1.6 Tinjauan Pustaka

Untuk melakukan riset yang valid dan kredibel, penulis menggunakan beberapa sumber literatur serta data utama yang akan digunakan penulis sebagai bahan rujukan dalam membantu menulis penelitian kali ini.

Tinjauan pustaka pertama memiliki judul Aktivitas Internasional Gerakan Separatis Papua yang ditulis oleh Poltak Partogi Nainggolan, penulis gunakan untuk menganalisis gerakan-gerakan separatis Papua pada lingkup internasional yang ternyata semakin meningkat. Nainggolan (2014) juga menjelaskan bahwasanya pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai macam cara untuk meredam aktivitas dan konflik separatis yang terjadi di Papua baik secara lingkup domestik hingga ke lingkup internasional.

Pada tinjauan pustaka kedua yang penulis gunakan sebagai bahan literatur dalam melakukan penelitian ini yang ditulis oleh Tri Yudha Ismanto dengan judul '*Winning the Papuans "Hearts and Minds": Analyzing The Indonesian Strategy To Counter The Papuan Insurgency*' secara komprehensif membahas terkait dengan strategi autonomi serta operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia belum mampu untuk menghentikan kelompok-kelompok gerakan separatis yang terjadi di Papua. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ismanto (2019), menjelaskan bahwasanya masyarakat Papua menyalahkan pemerintah Indonesia atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua termasuk dengan kemiskinan yang ada di Papua serta sejarah sengketa yang terjadi hingga

mengakibatkan adanya kelompok-kelompok yang ingin memerdekakan diri dari NKRI. Peningkatan otonomi, penguatan diplomasi, serta dialog yang konstruktif dipercaya Ismanto (2019) sebagai kunci strategi yang tepat dalam menanggapi isu separatisme yang ada di Papua.

Pada tinjauan pustaka ketiga yang penulis gunakan sebagai tinjauan literatur pada penelitian kali ini ditulis oleh Djon Afriandi pada 2015 yang berjudul "*The Indonesian Coin Strategy: Failures and Alternatives Approaches in Overcoming the Papuan Insurgency*" membahas lebih lanjut terkait dengan strategi pemerintah Indonesia dalam memenangkan perang pengaruh dan diplomasi yang baik dalam perubahan politik internasional yang dinamis agar dapat memenangkan dan mempertahankan kedaulatan NKRI dari kelompok separatis yang ada di Papua (Afriandi, 2015).

Pada tinjauan pustaka yang keempat memiliki judul Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis di Papua yang ditulis oleh Indah Putri Mardiani, Ismi Anisah, Marlina Hasibuan, dan Nur Fadilah pada tahun 2021 membahas mengenai masyarakat Papua terkhusus yang tergabung dalam kelompok separatis OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang menganggap Indonesia atau pemerintah Indonesia merupakan penjajah setelah penjajahan Belanda. Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan kelompok gerakan separatis Papua, dialog antara kedua belah pihak dipercayai sebagai kunci dalam penyelesaian konflik yang terjadi (Mardiani et al. 2021)

Dari sumber-sumber literatur yang peneliti sampaikan diatas akan selanjutnya dikontekstualisasikan melalui pendekatan *Decision Making*

Theory yang diajukan oleh William D. Coplin dalam menganalisis hasil akhir serta pendekatan atau pilihan alternatif lain yang tersedia terkait dengan penelitian Strategi preventif Kementerian Luar Negeri terhadap isu Papua pada tahun 2023 dengan studi kasus gerakan separatis yang ada di Papua.

Tabel 1.1 Mengenal Isi Pokok dari Keseluruhan Literatur Review

No.	Nama Penulis	Judul Literatur	Tempat Publikasi	Argumen Penulis
1.	Poltak Partogi Nainggolan	Aktivitas Internasional Gerakan Separatis Papua	Jurnal Kajian	● Gerakan Separatis Papua di lingkup Internasional semakin meningkat ● Pemerintah Indonesia tetap mengupayakan berbagai cara untuk meredam aktivitas gerakan separatis Papua baik secara internasional maupun domestik
2.	Tri Yudha Ismanto	Winning The Papuans "Heart and Minds": Analyzing The Indonesian Strategy To Counter The Papuan Insurgency	Naval Post Graduate School	❖ Autonomi dan Operasi militer yang dilakukan tidak memberhentikan kelompok separatis ❖ Masyarakat Papua menganggap pemerintah Indonesia bersalah atas pelanggaran ham yang ada, kemiskinan, dan sejarah yang disengketakan yang akhirnya mendorong mereka untuk ingin merdeka dari NKRI ❖ Peningkatan otonomi, penguatan diplomasi, serta dialog yang konstruktif menjadi salah satu kunci strategi tindakan preventif terhadap isu yang ada

3.	Djon Afriandi	The Indonesian Coin Strategy: Failures and Alternatives Approaches in Overcoming the Papuan Insurgency	Naval Post Graduate School	➔ Pemerintah Indonesia harus memenangkan perang pengaruh dan diplomasi yang baik dalam perubahan politik internasional yang dinamis agar dapat memenangkan dan mempertahankan kedaulatan NKRI dari kelompok separatis yang ada di Papua.
4.	Indah Putri Mardiani Ismi Anisah Marlina Hasibuan Nur Fadilah	Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatis di Papua	Jurnal Nasional Indonesia	➢ Pemerintah Indonesia dianggap sebagai penjajah setelah penjajahan Belanda oleh kelompok separatis OPM atau Organisasi Papua Merdeka. ➢ Dialog kedua belah pihak dipercaya sebagai salah satu kunci penyelesaian konflik gerakan separatis yang terjadi di Papua.

Keempat bahan rujukan diatas merupakan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan isu Separatisme dan tindakan preventif terhadap hal tersebut di Papua yang penulis rasa cukup relevan sebagai sumber utama dalam mengkaji dan membahas topik penelitian pada kali ini. Faktor-faktor domestik maupun internasional tak luput menjadi pembahasan dalam pengkajian isu terkait topik yang dibahas pada penelitian kali ini. Melalui sumber-sumber diatas yang akan menjadi data penulis untuk mencoba sebuah pembaruan dalam menilik fenomena gerakan separatis yang ada di Papua. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut terkait langkah strategi preventif yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia saat ini dalam membantu menangani isu konflik gerakan separatis yang terjadi di Papua.

1.7 Kerangka Pemikiran

Policy Making dan Implementasi: Tugas BSKLN Kementerian Luar Negeri RI.

Dalam buku yang bertajuk "Diplomacy Theory and Practice" yang ditulis oleh G. R. Berridge menjelaskan bahwasanya Kementerian Luar Negeri sebagai suatu instansi pemerintahan bertanggung jawab dalam advising policy atau kebijakan yang diharapkan nantinya dapat diimplementasikan secara efektif serta dalam membantu menyusun aturan dan arahan dalam memastikan faktor-faktor tersebut benar terlaksana (Berridge 2010). Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwasanya Kementerian Luar Negeri memiliki beberapa peran penting dalam menjalankan tugasnya diantaranya adalah *staffing and supporting missions abroad, policy advice and implementation, policy coordination, dealing with foreign diplomat at home, and building domestic support* (Berridge, 2010).

Dalam peran *Staffing and supporting missions abroad* dijelaskan lebih detail terkaait dengan pentingnya peran Kementerian Luar Negeri dalam menyediakan personel-personel untuk kepentingan diplomatik nasional dan misi konsulat diluar negeri, termasuk dengan memiliki pusat organisasi internasional yang permanen. Dalam peran *Policy-making and implementations*, pegawai atau pejabat Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab dalam memberikan saran atau rekomendasi kebijakan yang dapat di implementasikan, sesuai dengan instruksi

yang diberikan dan memastikan hal tersebut dapat dilaksanakan yang mana pada policy-making and Implementation sendiri terdapat political departments yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu geographical dan functional departments.

Pada peran *Policy Coordinations* dijelaskan bahwasanya Kementerian Luar Negeri untuk saat ini tidak memiliki wewenang yang besar seperti dahulu dalam menjalankan hubungan luar negeri secara langsung karena dengan perkembangan zaman dan politik yang ada saat ini tidak sedikit negara dengan struktur pemerintahan dan departemen yang ada didalamnya yang memiliki peran khusus dalam menangani isu luar negerinya secara langsung seperti Amerika Serikat. Pada peran *Dealing with Foreign Diplomats at Home*, lebih membahas terkait dengan peran diplomat dalam mengumpulkan informasi dan memiliki kapasitas intrik yang menjadikan Kementerian Luar Negeri harus lebih berhati-hati terkait dengan diplomat atau representasi negara lain yang berkunjung dalam menjaga keamanan. Pada peran *Building Domestik Support* membahas terkait pentingnya dukungan domestik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan.

Kementerian Luar Negeri dalam pembuatan kebijakan memiliki departemen-departemen pendukung yang membantu proses pembuatan kebijakan tersebut. Unit perencana atau dalam istilah lain Planning Unit berperan atau memiliki fungsi dalam membantu mencegah konflik atau permasalahan yang akan datang dengan cara menghindari pola pemikiran yang bersifat jangka pendek atau *conventional mindset*.

Untuk menganalisis fenomena dalam penelitian ini teori ini dapat terlihat dalam bagaimana Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri sebagai salah satu badan yang ada di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berperan penting sebagai

unit perencanaan atau *planning unit* dalam membantu merumuskan suatu kebijakan luar negeri yang dalam hal ini terkait dengan isu separatisme yang ada di Papua. Namun diperlukan proses serta rangkaian step yang panjang dalam merumuskan suatu kebijakan hingga nantinya akan disahkan dan di implementasikan agar berjalan secara efektif.

Dengan proses serta rangkaian step yang panjang dan sangat hati-hati dalam merumuskan suatu kebijakan dapat disimpulkan bahwasanya Kementerian Luar Negeri bukan hanya menjalankan tugas dan mengemban tanggung jawab untuk kebutuhan masa sekarang, namun juga memastikan bahwasanya kebijakan tersebut dapat menunjang kebutuhan atau hal-hal yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri hadir dan berperan sebagai unit perencanaan atau *planning* unit bertanggung jawab penuh dalam proses perumusan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat dipersiapkan dengan matang dan siap menghadapi tantangan global yang semakin dinamis.

1.8 Metode Pelaksanaan Kegiatan

1.8.1 Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan kali ini adalah berupa praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa hubungan internasional Universitas Islam Indonesia di Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada periode Februari-April 2023.

1.8.2 Subjek dan Objek Kegiatan

Subjek pada kegiatan praktik kerja lapangan kali ini adalah Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Adapun objek pada kegiatan praktik kerja ini yaitu terkait analisis strategi preventif Kementerian Luar Negeri dalam menangani isu-isu Papua studi kasus gerakan separatis yang ada di Papua

1.8.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan praktik kerja lapangan berlokasi di Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Indonesia pada divisi Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data atau SK IKAD, Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat, 10110, Indonesia. Adapun waktu pelaksanaan praktik kerja adalah 14 Februari 2023–14 April 2023.

1.8.4 Linimasa Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 1.2 Linimasa Pelaksanaan Kegiatan

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	14 Februari – 22 Februari 2023	*Entry briefing*, pengenalan tugas dan kewajiban peserta magang, membuat policy brief, mendesain konten BSKLN, pengenalan terkait data
2.	23 Februari – 16 Maret 2023	Webinar Bincang Data Papua, *Foreign Policy Data Talks*, Bank Data BPS, Asean as the Epicentrum of Growth
3.	17 Maret–14 April 2023	*Peer Learning* BSKLN, E-Booklet BSKLN, *Data Trade* ASEAN, *Exit Briefing.*

1.8.5 Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian kali ini menggunakan metode pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber data primer tersebut berupa notulensi webinar **Bincang Data "Papua Pasca Otsus 2021: *What is Our Next Agenda*?"** yang dilakukan bersama dengan KBRI di seluruh dunia yang diajukan sebagai bahan pembahasan sikap preventif Indonesia terhadap isu Papua. Adapun sumber data sekunder diantaranya jurnal, website resmi, dan laporan-laporan relevan dan bersifat kredibel yang selanjutnya dianalisis untuk mengkontekstualkannya ke dalam penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB 1

Dalam laporan ini berisi tentang penelitian yang disaji secara sistematis tersusun bab-bab pembahasan. Diawali dengan bab pertama yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode pelaksanaan kegiatan, dan sistematika pembahasan topik analisis sikap dan strategi preventif pemerintah Indonesia terlebih Kementerian Luar Negeri dalam menanggulangi isu Papua dan meningkatkan kedaulatan NKRI.

BAB 2

Adapun pada bab kedua dijelaskan mengenai profil instansi/lokasi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan magang.

BAB 3

Adapun pada bab ketiga penulis menjelaskan secara komprehensif dan mendetail terkait analisis sikap dan strategi preventif pemerintah Indonesia terlebih Kementerian Luar Negeri dalam menanggulangi isu Papua dan meningkatkan kedaulatan NKRI dengan mengkontekstualkannya melalui teori *decision making process*.

BAB 4

Pada bab keempat pada penelitian kali ini penulis akan menarik kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang didapat.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI/LOKASI PRAKTIK LAPANGAN

2.1 Profil Instansi/Lokasi Kegiatan

Dalam praktik kerja lapangan kali ini, laporan praktik kerja dibuat sebagai bagian dari progran praktik kerja yang telah diselesaikan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari Februari hingga April 2023 di BSKLN atau Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri. Program praktik kerja yang dilakukan di Kementerian Luar Negeri bertujuan agar penulis mendapatkan kesempatan pengalaman tidak hanya secara teoritis dari perkuliahan saja namun secara praktis dan realistis di lapangan serta untuk memperluas pengetahuan pada bidang yang sesuai dengan fokus studi yang penulis jalankan dengan mendapatkan bimbingan langsung tentunya dari para diplomat, staf serta ekspertis yang bekerja di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berperan sebagai salah satu instansi pemerintah yang menggeluti segala urusan yang berhubungan dengan partner luar negeri, kebijakan luar negeri dan sebagainya yang menjadi tempat impian penulis untuk dapat merasakan langsung pengalaman kerja di dalamnya. Kementerian Luar Negeri juga memiliki fokus pada isu-isu luar negeri dan berperan penting dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia menjadikan kementerian ini menjadi tempat yang tepat bagi penulis untuk dapat mengembangkan kapabilitas serta kemampuan penulis sesuai dengan bidang yang penulis

geluti saat ini. Kementerian Luar Negeri juga memiliki peranan yang sangat besar bagi penulis untuk dapat menambah serta memperluas jaringan penulis. Bertempat di ibu kota Indonesia, peserta yang mengikuti program praktik kerja di Kementerian Luar Negeri pun berasal dari beragam universitas yang ada di Indonesia yang menjadi salah satu poin tambahan bagi penulis untuk dapat menambah jaringan, relasi, menambah wawasan dan perspective baru dari rekan-rekan praktik kerja yang datang dari berbagai latar belakang yang berbeda menjadikan pengalaman yang penulis dapatkan semakin berkesan. Dapat berinteraksi langsung, berdiskusi serta berdialog dengan para diplomat, ekspertis serta staf yang ada di Kementerian Luar Negeri sangat menambah wawasan penulis terkait dengan isu-isu yang sedang dihadapi serta memberikan banyak *insight* terkait dunia pekerjaan dan lapangan yang ada yang membuka pikiran penulis untuk melihat praktik serta realita yang ada di dunia lapangan pekerjaan saat ini.

Selama di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, penulis ditempatkan di salah satu unit kerja yang ada di Kementerian Luar Negeri yaitu Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri atau yang biasa dikenal sebagai BSKLN. BSKLN sendiri memiliki fokus dan peran yang sangat strategi di Kementerian Luar Negeri dalam membantu merumuskan kebijakan luar negeri di Indonesia dalam berbagai cakupan atau bidang seperti pada aspek ekonomi, budaya, keamanan, politik dan sosial. Tak hanya itu, BSKLN juga memiliki fungsi yang besar dalam menjaga serta membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara/organisasi mitra di tingkat global, berperan

penting dalam menjaga kepentingan bangsa Indonesia di tingkat global, memastikan kebijakan luar negeri Indonesia harus sesuai dengan asas-asas demokrasi, mengusung dan menjaga perdamaian dan menjaga kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. BSKLN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan tugas nya memastikan bahwasanya kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus sesuai dengan kepentingan nasional yang dimiliki, mendorong kerjasama internasional yang dapat saling menguntungkan serta memperkuat posisi bangsa Indonesia di mata dunia. BSKLN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga berkomitmen dalam menjaga keamanan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui langkah diplomasi yang srategis, serta menjaga dan mempromosikan perdamaian.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Dalam praktik kerja lapangan yang penulis laksanakan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, penulis berkesempatan untuk ditempatkan di Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri atau BSKLN selama periode praktik kerja berlangsung. Kementerian Luar Negeri adalah salah satu kementerian atau instansi pemerintah dalam pemerintahan Indonesia yang berfungsi sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan urusan luar negeri negara Indonesia. Seperti yang sudah tertulis pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun

2021 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, dijelaskan pada BAB 1 mengenai kedudukan, tugas dan fungsi. Fungsi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tertulis dalam pasal 5 sebagai berikut:

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri.
b. Pengoordinasian penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri.
d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemlu dan Perwakilan Republik Indonesia.
e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemlu dan Perwakilan Republik Indonesia.
f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kemlu dan Perwakilan Republik Indonesia.
g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemlu.
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2023).

2.1.2 Tugas dan Fungsi Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN)

BSKLN atau Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri tertulis dalam Pasal 6 huruf j, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan penyusunan, perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan dan strategi pada bidang penyelenggaraan hubungan serta politik luar negeri. BSKLN atau Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri sendiri memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri dalam melakukan fungsinya di mana hal tersebut tertulis pada Pasal 585 yang berbunyi:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana serta program analisis dan rekomendasi strategi kebijakan pada bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri
b. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan pada bidang penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri.
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan pada bidang penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri.
d. Pelaksanaan tata kelola organisasi dan administrasi BSKLN.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2022).

2.1.3 Struktur Organisasi Instansi Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri

Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri atau yang biasa dikenal sebagai BSKLN adalah salah satu lembaga yang berada dibawah naungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam membantu merumuskan kebijakan strategis serta strategi kebijakan luar negeri Indonesia. Secara spesifik BSKLN memiliki struktur atau susunan organisasi yang terdiri atas beberapa unit kerja yang bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya yang terdiri dari:

1. Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri

   Adapun posisi Kepala BSKLN saat ini dipimpin oleh Bapak Yayan Ganda Hayat Mulyana yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri Indonesia. Sesuai dengan struktur organisasi, Kepala BSKLN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membawahi lima divisi utama yang ada di BSKLN saat ini.

2. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri

   Adapun posisi sekretaris BSKLN saat ini dipimpin oleh Ibu Nina Kurnia Widhi yang bertanggung jawab membawahi divisi Bagian Perencanaan, Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Tata Usaha, Organisasi, dan Publikasi, serta Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris BSKLN

3. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

   Adapun posisi Kepala PSKK Aspasaf saat ini dipimpin oleh Bapak Muhammad Takdir. Kepala PSKK Aspasaf bertanggung jawab membawahi Sub bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional PSKK Aspasaf saat ini.

4. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa

   Adapun posisi Kepala PSK Amerop saat ini dipimpin oleh Bapak Spica Alphanya Tutuhatunewa dan bertanggung jawab membawahi Sub bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional PSK Amerop

5. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral

   Adapun posisi Kepala PSKM saat ini dipimpin oleh Bapak Budi Rio Rahmanto yang bertanggung jawab membawahi Sub bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di PSKM saat ini.

6. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data

   Adapun posisi Kepala Pusat SK IKAD saat ini dipimpin oleh bapak Edi Suharto yang memiliki tanggung jawab membawahi Sub bagian Tata Usaha dan juga Kelompok Jabatan Fungsional Pusat SK IKAD saat ini (Kementerian Luar Negeri 2022)

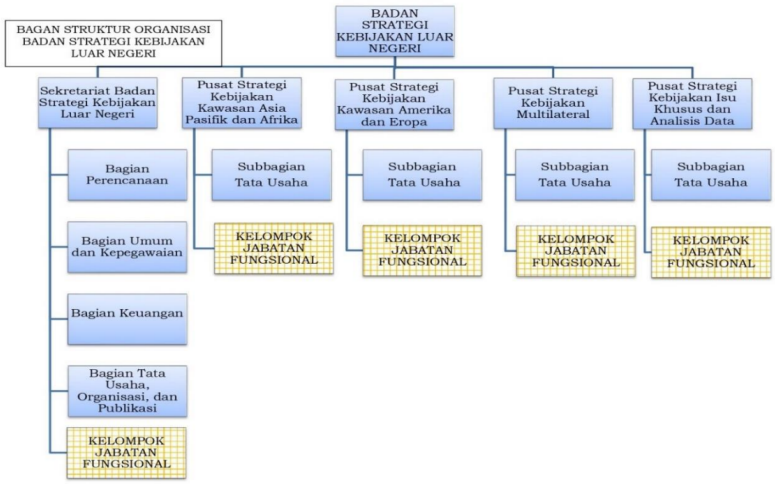
2.1.4 Tugas dan Fungsi Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data

Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data atau yang biasa dikenal dengan SK IKAD merupakan salah satu satuan unit kerja yang termasuk di dalam BSKLN atau Badan Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pusat SK IKAD sendiri merupakan unit kerja yang baru terbentuk yang menjadi bagian dari BSKLN. Tugas dari Pusat SK IKAD sendiri sudah tertulis merujuk pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, program analisis data, rencana, serta sinkronisasi perumusan, pemberian dan penetapan rekomendasi kebijakan terhadap isu khusus di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Pusat SK IKAD sendiri pun dibentuk melalui Permenlu 6/2021, di mana fungsi yang dijalankan oleh Pusat SK IKAD adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis data dan rekomendasi strategi kebijakan terhadap isu khusus di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;

b. Pelaksanaan analisis data dan pemberian rekomendasi kebijakan terhadap isu khusus di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
c. Pelaksanaan kerja sama sinkronisasi data analisis, perumusan, pemberian rekomendasi, penetapan strategi kebijakan dan isu khusus di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis data, serta pemberian rekomendasi strategi kebijakan terhadap isu khusus di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; dan
e. Pelaksanaan layanan manajemen Pusat (Kementerian Luar Negeri 2022).

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BSKLN



Sumber: Kementerian Luar Negeri (2022)

Berdasarkan susunan organisasi BSKLN tersebut didesain dengan tujuan untuk memastikan bahwasanya kebijakan luar negeri Indonesia direncanakan dan dirumuskan dengan berdasarkan analisis yang mendalam, cermat serta dilaksanakan dengan efektif dengan tujuan untuk meningkatkan kepentingan nasional Indonesia di tingkat domestik maupun internasional.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan Magang

Selama pelaksanaan praktik kerja lapangan yang penulis laksanakan di BSKLN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, penulis beserta rekan praktik kerja yang lain sangat terbantu dengan adanya arahan dan bimbingan dari *supervisor* yang bertugas untuk membantu mengkoordinir peserta praktik magang yang ada di setiap dan masing-masing pusat. Selama praktik kerja berlangsung peserta praktik kerja lapangan berada dalam pengawasan langsung oleh *supervisor* di lingkup kerja pusat masing-masing di mana *supervisor* nantinya akan memberikan umpan balik secara berkala

langsung kepada peserta praktik kerja lapangan dengan tujuan agar dapat tetap berada pada jalur penugasan dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban selama melaksanakan praktik kerja lapangan serta dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di pusat masing-masing.

Penulis selama melaksanakan praktik kerja lapangan di BSKLN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tepatnya di Pusat SK IKAD berkesempatan untuk melaksanakan tugas, *project* serta membantu koordinasi *event* yang dilaksanakan di Pusat SK IKAD bersama dengan para diplomat, staf serta *data analyst* yang berada di Pusat. Setiap harinya bekerja secara *hybrid* di Pusat SK IKAD penulis berkesempatan untuk dapat berdialog dan berdiskusi langsung dengan para diplomat, staf serta *data analyst* yang bekerja di Pusat SK IKAD membahas mengenai isu-isu yang sedang dibahas bersama di Pusat SK IKAD yang hal ini menjadi kesempatan yang sangat luar biasa bagi penulis karena dapat menambah wawasan, *insight* serta menambah perspektif baru bagi penulis dalam melihat serta menjadi aktor Hubungan Internasional yang terjun langsung ke lapangan dalam mencoba mengatasi suatu isu yang ada dan sedang dibahas oleh Kementerian Luar Negeri saat ini. Tak hanya fokus pada penugasan, penulis selaku peserta praktik kerja lapangan yang terjun langsung di Kementerian Luar Negeri tetap mengutamakan kewajiban dalam hal menjaga serta memahami aturan-aturan yang berlaku di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia seperti misalnya terkait dengan kebijakan etika kerja selama bergabung dengan Kementerian Luar

Negeri Republik Indonesia, privasi serta keamanan yang senantiasa harus dijaga selama melaksanakan praktik kerja lapangan.

Selama bergabung dengan Pusat SK IKAD penulis beserta dengan rekan praktik kerja yang lain memiliki tanggung jawab untuk membantu para diplomat, staf serta data analyst yang ada di Pusat SK IKAD. Ada banyak hal-hal serta tugas yang telah penulis serta rekan kerja praktik lapangan selama melaksanakan program di Pusat SK IKAD misalnya membantu diplomat untuk membuat policy brief pada isu-isu tertentu, membantu data analyst untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam membuat rekomendasi kebijakan, membantu men*translate* data agar mudah dipahami oleh para pimpinan Kementerian Luar Negeri, membantu *event-event* yang dilaksanakan di Pusat SK IKAD, membantu membuat notulensi pada rapat-rapat internal maupun eksternal yang dilaksanakan oleh Pusat SK IKAD, membantu membuat konten yang akan di *publish* di akun media sosial BSKLN, membantu membuat buletin ASEAN, dan masih banyak lagi.

Berbeda dengan pusat-pusat yang lain yang berada di bawah BSKLN, Pusat SK IKAD merupakan salah satu pusat yang baru dibentuk pada tahun 2021 sesuai dengan Permenlu 6/2021 di mana oleh sebab itu penulis beserta dengan rekan praktik kerja yang lain serta para staf, diplomat serta data analyst Pusat SK IKAD sering kali menemukan tantangan-tantangan selama bekerja seperti misalnya selama melaksanakan praktik kerja kemarin penulis beserta rekan praktik kerja lapangan yang lain yang tergabung di Pusat SK IKAD tidak terbagi kedalam fungsi-fungsi yang ada

seperti hal nya yang ada di Pusat-Pusat lain. Selain itu, Pusat SK IKAD juga hadir membantu pusat-pusat lain dalam mem *provide* data yang dibutuhkan dalam pembuatan serta perumusan rekomendasi kebijakan sehingga sering kali penulis beserta rekan praktik kerja yang lain bekerja sama membuat *bank data* yang dapat digunakan dalam menganalisis suatu permasalahan atau isu dan juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam merumuskan suatu kebijakan.

Salah satu pekerjaan yang sudah penulis laksanakan selama bergabung dengan Pusat SK IKAD adalah membantu penyusunan *policy brief* di mana penulis bersama dengan rekan praktik kerja yang lain membantu menerjemahkan data singkat yang ada di Global Forecast agar nantinya akan lebih mudah dipahami oleh para diplomat untuk mengkaji suatu isu dan akhirnya memberikan rekomendasi kebijakan pada isu-isu tersebut

Pekerjaan lain yang sering kali penulis kerjakan bersama dengan rekan kerja praktik kerja lapangan di Pusat SK IKAD adalah mengumpulkan, mencari serta menerjemahkan data agar menjadi bahan dalam pembuatan serta perumusan suatu rekomendasi kebijakan dan sebagai acuan dalam melihat serta menilai suatu isu yang sedang dibahas di Kementerian Luar Negeri pada saat itu, diantaranya adalah Pencarian data investasi inbound dan outbound Indonesia pada kurun waktu tertentu, analisa data inbound dan outbound dengan negara mitra, membuat *bank data* terkait BPS atau Badan Pusat Statistik data di seluruh dunia, pencarian

data persebaran BUMN di seluruh dunia, Pencarian data terkait analisis separatis yang ada di Papua dan masih banyak lagi.

Selama melaksanakan program praktik kerja di BSKLN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, penulis memperoleh begitu banyak manfaat serta pengetahuan yang sangat berguna dalam meningkatkan kapabilitas, kemampuan serta keterampilan yang penulis miliki sesuai dengan bidang yang penulis sedang geluti saat ini. Tak hanya itu, penulis juga merasakan manfaat dari terbangunnya jaringan serta relasi yang luas dan profesional yang penulis bangun selama melaksanakan praktik kerja lapangan yang sangat berguna di masa yang akan datang nantinya. Penulis juga berkesempatan untuk dapat terjun langsung dalam perumusan serta menentukan strategi-strategi rekomendasi kebijakan luar negeri Indonesia. Penulis mendapatkan manfaat *hard-skills* serta *soft-skills* yang penulis kembangkan selama melaksanakan praktik kerja lapangan di BSKLN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang sangat berguna bagi masa depan penulis yang nantinya ingin terjun menjadi profesional di bidang ini.

Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan praktik kerja lapangan di BSKLN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia penulis kategorikan menjadi tiga hal, yaitu:

2.2.1 Pengenalan Lingkungan Kerja Kementerian Luar Negeri RI

Selama penulis bergabung menjadi bagian dari BSKLN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, penulis beserta dengan rekan praktik kerja lapangan yang lain menjalani tahapan

pengenalan terhadap lingkungan kerja yang ada di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di mana hal tersebut dilaksanakan sebanyak tiga kali selama periode waktu praktik kerja lapangan. Penulis bersama dengan rekan praktik kerja lapangan yang lain berkesempatan untuk mendengarkan pemaparan materi terkait dengan susunan organisasi yang ada di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sekaligus terkait dengan fungsi, tugas, wewenang yang dimiliki oleh para pemangku jabatan mulai dari menteri hingga ke tiap-tiap kepala pusat.

Pada kesempatan ini, penulis beserta dengan rekan praktik kerja yang lain juga mendapatkan materi terkait pemahaman tugas serta pekerjaan yang harus dikerjakan selama periode praktik kerja lapangan. Tak hanya itu, penulis juga mendapatkan pemahaman terkait dengan etika pekerjaan, sikap, dan lain lain selama melaksanakan praktik kerja di BSKLN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

2.2.2 Training/Pelatihan

Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di BSKLN Kementerian Luar Negeri terkhusus di Pusat SK IKAD penulis banyak menambah serta mengasah kemampuan soft skills yang penulis miliki yang mungkin tidak penulis dapatkan selama pembelajaran di ruang kelas. Selama di Pusat SK IKAD penulis bersama dengan para diplomat, data analyst serta rekan praktik kerja yang lain banyak terlibat dalam diskusi terkait analisis mendalam

terkait isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan sedang dibahas di Pusat SK IKAD. Penulis beserta dengan rekan praktik kerja yang lain sering melakukan riset bersama terkait data dari suatu isu untuk nantinya dianalisis bersama dengan para diplomat serta data analyst yang ada di Pusat SK IKAD.

Hal-hal tersebut merupakan bagian kecil dari training atau pelatihan yang penulis dapatkan selama bergabung dengan Pusat SK IKAD di mana training tersebut berbentuk penugasan yang diberikan oleh para diplomat serta data analyst yang berbentuk variatif mulai dari pengumpulan, pencarian serta penerjemahan data (NSWI BPS, trademap.org, Databank, EU data, world bank data), membuat notulensi, pembuatan booklet, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh penugasan yang diberikan oleh diplomat yang penulis merasa sangat menarik untuk dikaji dan sangat membantu penulis dalam mengkaji dalam suatu penelitian ini adalah ketika penulis ditugaskan untuk menjadi notulen dalam agenda **Bincang Data "Papua Pasca Otsus 2021: *What is Our Next Agenda*?"** di mana pada lanjutannya penulis beserta dengan rekan praktik kerja lapangan yang lain diminta untuk membantu menganalisis serta mencari data terkait pergerakan kelompok separatis Papua serta negara atau kelompok simpatisan dalam hal tersebut.

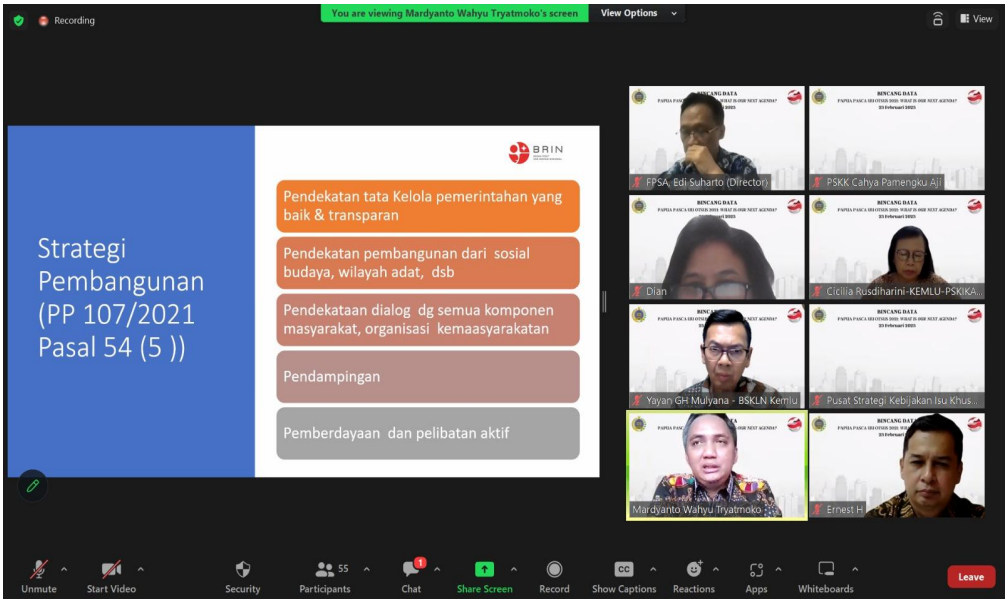
2.2.3 Event Coordinating

Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di Pusat SK IKAD BSKLN Kementerian Luar Negeri, penulis juga aktif dalam

melaksanakan dan berpartisipasi aktif dalam agenda event yang dilaksanakan oleh Pusat SK IKAD. Agenda *Event Coordinating* merupakan hal yang baru pula yang penulis dapatkan selama bergabung dan melaksanakan program praktik kerja karena penulis dapat terlibat langsung dalam kegiatan Pusat SK IKAD yang bersifat formal maupun non-formal.

Agenda kegiatan formal misalnya penulis berkesempatan untuk menghadiri dan membantu dalam notulensi pada kegiatan **Bincang Data "Papua Pasca Otsus 2021: *What is Our Next Agenda*?"** yang mengundang seluruh Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Yang tersebar di seluruh dunia yang dihadiri oleh para duta besar serta diplomat yang sedang bertugas di KBRI serta KJRI dalam membahas bersama terkait update isu separatisme yang ada di Papua dengan harapan dapat menampung segala saran serta masukan dari seluruh duta besar dan diplomat Indonesia terkait langkah selanjutnya yang dikira tepat dalam menentukan strategi kebijakan yang sekiranya dapat membantu meredam konflik yang terjadi dan ada saat ini di Papua pada tanggal 24 Februari 2023 secara online melalui *platform Zoom*.

Gambar 1.2 Screenshot kegiatan Webinar Bincang Data "Papua Pasca Otsus 2021: What is Our Next Agenda?"



Selama pelaksanaan kegiatan, penulis sebagai peserta praktik kerja lapangan ikut berpartisipasi aktif dalam membantu menyukseskan kegiatan tersebut. Penulis membantu jalannya acara tersebut dengan membuat notulensi acara serta membantu meng capture moment-moment selama berlangsung nya kegiatan acara.

Dalam kegiatan non-formal yang ada, penulis bersama dengan rekan praktik kerja lapangan yang lain pun berkesempatan membantu mensukseskan agenda kegiatan yang dilakukan di Pusat SK IKAD salah satunya adalah agenda seremonial penerimaan diplomat-diplomat yang baru menyelesaikan masa tugasnya di luar negeri dan bergabung dengan Pusat SK IKAD bersama dengan Kepala BSKLN beserta jajaran Kepala Pusat dari Pusat lain yang berada dibawah naungan BSKLN Kementerian Republik Indonesia.

Gambar 1.3 dokumentasi kegiatan penerimaan diplomat ke Pusat SK IKAD bersama dengan Kepala BSKLN



Tidak ada banyak hambatan yang penulis rasakan selama penulis melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan rekan praktik kerja lapangan di Pusat SK IKAD. Penulis berkesempatan untuk bekerja bersama dengan diplomat yang sangat baik dan membantu dalam membagikan ilmu pengetahuan, tips and tricks yang sangat berguna dalam menyelesaikan penugasan-penugasan yang diberikan dan pekerjaan yang akan datang dimasa depan. Relasi, ilmu, serta pengalaman yang telah penulis dapatkan selama melaksanakan praktik kerja lapangan sangat membantu penulis untuk menyiapkan diri penulis untuk nantinya dapat terjun menjadi aktor hubungan internasional yang turun langsung kelapangan seperti para diplomat dan pekerja Kementerian Luar Negeri yang penulis temui selama periode praktik kerja. Penulis juga mendapat wawasan yang lebih terkait dengan proses pengambilan keputusan dan koordinasi dalam perumusan suatu rekomendasi kebijakan yang dilakukan antar pusat atau bahkan lembaga dalam tujuan untuk melahirkan kebijakan yang efektif dan baik bagi negara Indonesia.

Melalui berbagai kegiatan serta manfaat yang telah penulis dapatkan selama melaksanakan praktik kerja lapangan di Pusat SK IKAD BSKLN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwasanya apa yang penulis dapatkan selama program praktik kerja lapangan merupakan suatu hal yang sangat luar biasa dan berharga bagi penulis. Penulis dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam dan secara langsung terkait dinamika yang terjadi di dalam Kementerian Luar Negeri terlebih proses dari terbentuknya perumusan kebijakan luar negeri. Pengembangan kapabilitas serta keterampilan yang penulis dapatkan pun akan sangat berguna bagi karir masa depan yang ingin penulis raih. Praktik kerja lapangan ini memiliki peranan yang sangat penting sekaligus berharga dalam pengembangan profesionalitas penulis dan meningkatkan minat penulis untuk dapat nantinya berkontribusi dalam membantu upaya kepentingan nasional dalam sektor Internasional.

2.2.4 Timeline Kegiatan

Tabel 1.3 Timeline kegiatan praktik kerja

Pelaksanaan		
Tanggal	**Jenis Kegiatan**	**Capaian**
14-02-2023	*Entry Briefing*	Mengetahui pengetahuan dasar dan lingkungan magang kementerian luar negeri
15-02-2023	Pembuatan *Policy Brief*	Mengetahui bagaimana perumusan kebijakan luar negeri yang dalam hal ini berkaitan dengan *Global Forecast*
16-02-2023	Pembuatan Konten Instagram BSKLN	Meningkatkan *engagement* di sosial media terkait informasi seputar BSKLN Kementerian Luar Negeri

17-02-2023	Penugasan Penerjemahan Buku	Mengetahui perumusan serta sumber-sumber dalam merumuskan kebijakan luar negeri
20-02-2023	*Daily Briefing* terkait data	Mengetahui terkait pengumpulan data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan luar negeri
21-02-2023	Penugasan *design* Canva	Membantu membuat desain sertifikat
22-02-2023	Penugasan *design* Canva	Membantu membuat desain sertifikat serta flyer dari platform Canva
23-02-2023	Webinar Bincang Data: Arah Baru Otonomi Khusus Papua	Membantu membuat notulensi dalam kegiatan webinar bersama dengan KBRI di seluruh dunia
24-02-2023	Webinar Bincang Data: Arah Baru Otonomi Khusus Papua	Menggabungkan media serta hasil notulensi dari webinar yang diadakan
27-02-2023	*Foreign Policy Data Talks*	Notulensi selama kegiatan
28-02-2023	*Foreign Policy Data Talks* serta Pencarian Data	Notulensi kegiatan *Foreign Policy Data Talks* serta mencari data investasi inbound outbound dengan negara-negara mitra.
01-03-2023	Pencarian data *Investment Inbound Outbound*	Mengetahui dan melakukan *research* terkait data investasi *inbound* dan *outbound* dengan negara-negara mitra.
02-03-2023	Analisa data *inbound* dan *outbound* Indonesia dengan negara mitra	Mampu mengolah dan mencari data dari NSWI BKPM
03-03-2023	Pencarian dan analisis data BPS di seluruh dunia	Membuat dan mengolah bank data khusus untuk menampung informasi terkait BPS yang ada di tiap-tiap negara di seluruh dunia
06-03-2023	Pencarian data sebaran BUMN yang ada di seluruh dunia	Membuat dan mengolah bank data terkait persebaran BUMN yang ada di seluruh dunia
07-03-2023	Sosialisasi dari Kementerian Luar Negeri	Mengetahui dan mempelajari terkait sistem kerjasama dan struktur organisasi
08-03-2023	*Asean as the Epicentrum of Growth*	Mengetahui dan melakukan research terkait dengan Asean sebagai *epicentrum of growth*
09-03-2023	Analisa data perusahaan	Mengetahui terkait persebaran perusahaan Israel di Asia Pasifik

10-03-2023	Desain sertifikat	Membantu dalam desain sertifikat melalui platform Canva
13-03-2023	Sosialisasi terkait BSKLN Kementerian Luar Negeri	Mengetahui terkait struktur, tugas, fungsi yang ada di BSKLN
14-03-2023	Pencarian data dan analisis data terkait separatis Papua	Pencarian data dan membuat bank data terkait persebaran kelompok separatis atau pendukung separatis Papua di seluruh dunia
15-03-2023	Kegiatan Kuliah Umum dan FGD UMRAH BSKLN	Membantu seputar acara
16-03-2023	Kegiatan Kuliah Umum dan FGD UMRAH BSKLN	Membantu dokumentasi online terkait acara
17-03-2023	Data investasi *inbound investment* di Indonesia	Mengetahui dan merevisi data terkait investasi *inbound* di Indonesia dan negara mitra
20-03-2023	Pembuatan bank data sekaligus seremonial penerimaan staf yang baru bergabung di Pusat SK IKAD	Mengetahui dan membuat bank data terkait ekspor impor yang ada di Indonesia serta acara seremonial penyambutan diplomat yang baru kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Pusat SK IKAD
21-03-2023	Bazar di Kementerian Luar Negeri	Mengetahui kegiatan eksternal yang dilakukan dilingkungan Kementerian Luar Negeri
24-03-2023	Data Investasi Asean	Pencarian dan pengumpulan data terkait investasi yang ada di lingkup ASEAN
27-03-2023	E-Booklet BSKLN	Membantu merumuskan pembuatan e-booklet BSKLN
28-03-2023	*Data Intra-trade* ASEAN	Mengetahui dan membuat rekap data terkait komoditas ekspor dan impor *Intra-trade* ASEAN dalam kurun waktu 2021-2022
29-03-2023	*Data Intra-trade* ASEAN	Mengetahui dan membuat rekap data terkait komoditas ekspor dan impor *Intra-trade* ASEAN dalam kurun waktu 2021-2022
30-03-2023	*Data Trade* ASEAN	Mengetahui data terkait komoditas ekspor impor ASEAN
31-03-2023	Peer Learning BSKLN	Mengetahui terkait tugas Pusat SK IKAD dan tools yang sering digunakan dalam melakukan kajian

03-04-2023	Pengisian data survey	Membantu terkait pengisian survey di kementerian luar negeri
04-04-2023	Perolehan data melalui BPS sekaligus sesi sharing bersama dengan Kepala Pusat	Mengetahui terkait perolehan data impor ekspor melalui platform BPS sekaligus kegiatan sharing bersama Kepala Pusat SK IKAD
06-04-2023	Rapat Internal SK IKAD	Notulensi kegiatan rapat internal pusat SK IKAD
13-04-2023	Data matrix ekspor impor Afrika	Mengetahui data terkait ekspor impor Afrika dan membuat bank data terkait hal tersebut
14-04-2023	Laporan akhir magang sekaligus *exit briefing*	Melakukan presentasi terkait capaian dan kegiatan selama magang di Pusat SK IKAD periode Februari-April

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Latar Belakang Konflik

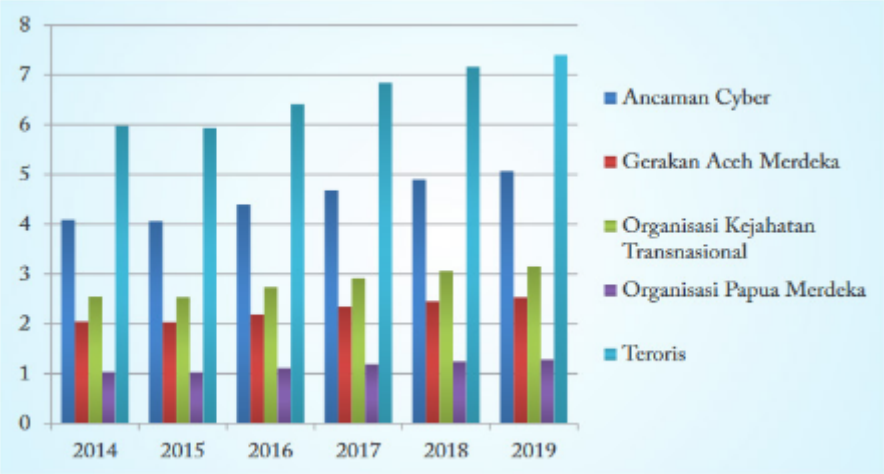
Latar belakang adanya separatis di Papua sudah ada jauh semenjak terjadinya kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana pada masa itu Belanda yang menjajah Indonesia telah merancang adanya pemerintahan bagi Papua agar dapat memisahkan diri dari Belanda maupun Indonesia (Mardiani et al. 2021). Walaupun demikian, pihak Pemerintah Indonesia sendiri tetap menyatakan bahwasanya wilayah Papua adalah wilayah yang termasuk kedalam NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perjanjian New York pada tahun 1962 yang pada saat itu tidak melibatkan masyarakat Papua sama sekali (Mardiani et al. 2021).

Pada tahun 1964, golongan terpelajar yang ada di Papua mengupayakan adanya kemerdekaan dan kebebasan bagi Papua dari Indonesia dan Belanda ke PBB yang kemudian gerakan ini berkembang menjadi suatu upaya separatis yang ada dan diupayakan hingga saat ini. Upaya gerakan separatis yang ada di Papua kemudian berkembang menjadi suatu organisasi yang terstruktur dan memiliki visi misi yang besar dalam memerdekakan Papua hingga saat ini yang dikenal sebagai OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Dinamika hubungan perjalanan antara gerakan separatis di Papua dan Pemerintah Indonesia tidak menemui titik yang baik

hingga saat ini. Organisasi Papua Merdeka atau OPM seringkali mengupayakan strategi-strategi untuk memerdekakan Papua dari Indonesia, seperti misalnya OPM mengupayakan peningkatan dukungan serta kesadaran tak hanya dari masyarakat Papua saja namun juga masyarakat dunia.

OPM atau Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi yang memiliki visi dan misi untuk memerdekakan dan memisahkan Papua dari Indonesia memiliki strategi yang dibagi ke beberapa bagian kelompok kerja yang terdiri dari kelompok yang berfokus pada aksi demonstrasi dan protes, kelompok separatis yang berdomisili di luar negeri, dan kelompok yang berfokus pada aksi bersenjata yang memiliki wilayah operasional yang berbeda-beda (Mardiani et al. 2021). Pemerintah Indonesia sendiri melalui instansi BIN atau Badan Intelijen Negara pernah melakukan proyeksi kekuatan Indonesia pada tahun 2014-2019 di mana hasilnya adalah kemampuan pertahanan dari Indonesia dinilai cukup lemah ketika disandingkan dengan ancaman gerakan separatis yaitu OPM dibandingkan dengan ancaman dari aktor non-negara lainnya (Badan Intelijen Negara 2014)

Grafik 1



Gambar 1.4 Grafik Ketahanan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Aktor-Aktor Non-Negara (Badan Intelijen Negara 2014)

Dari grafik tersebut terlihat jelas bahwasanya Indonesia lebih memiliki ketahanan yang kuat dilihat dari tingginya grafik saat menghadapi teroris, organisasi kejahatan, ancaman *cyber* dan GAM dibanding dengan ancaman separatis dari kelompok OPM. Terlihat bahwasanya grafik ketahanan Indonesia dalam menghadapi isu separatis yang ada di Papua sangat rendah dibanding dengan ancaman-ancaman negara yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwasanya gerakan separatis yang terjadi di Papua merupakan salah satu ancaman yang besar yang sedang dihadapi Indonesia terkhusus pada tahun 2014-2019 (Badan Intelijen Negara 2014).

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bergerak dan berperan penting dalam menjadi garda terdepan yang membantu menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa Indonesia di mata dunia. Melalui Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri

yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bertanggung jawab dalam membantu merumuskan suatu kebijakan luar negeri yang nantinya akan membantu dalam mempertahankan kedaulatan serta keutuhan Republik Indonesia di mata dunia. Namun dalam merumuskan dan merekomendasikan suatu kebijakan, diperlukannya kajian-kajian yang mendalam terkait isu-isu yang sedang dibahas oleh BSKLN Kemlu RI seperti halnya isu separatisme yang ada di Papua. Dalam mengkaji data yang dibutuhkan terkait hal tersebut, telah menjadi tanggung jawab Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data atau yang biasa disingkat SK IKAD dalam merumuskan rekomendasi kebijakan luar negeri yang tepat yang nantinya akan berguna dimasa yang akan mendatang.

3.2 Analisis Faktor Eksternal

Pengaruh atau faktor eksternal dari adanya konflik Papua bermula dari lalainya pemerintah dalam mengamankan eksternal support yang dimiliki oleh Indonesia. Pada saat pemerintahan BJ Habibie mendapatkan banyak tekanan internasional terkait dengan isu Timor Leste, yang akhirnya menjadikan pemerintahan Habibie menyetujui adanya kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia pada tahun 1999. Konflik tersebut akhirnya menjadi bahan bakar yang memperkeruh konflik separatis yang ada di Papua karena banyak masyarakat atau kelompok gerakan separatis Papua yang semakin semangat untuk memisahkan dirinya dari NKRI. Banyaknya pendekatan strategi yang ada pada saat itu malah menjadikan aksi

gerakan separatis yang ada di Papua semakin menjadi-jadi yang berakhir dengan banyaknya masyarakat hingga aparat keamanan yang menjadi korban dalam konflik tersebut yang berakhir pada status keamanan Papua sangat meresahkan dan berujung pada banyaknya opini negatif dari masyarakat Internasional. Banyak negara-negara di komunitas Internasional mengurangi support mereka ke Indonesia akibat dari konflik yang terjadi di Papua yang mengindikasikan sejak dulu pemerintah Indonesia gagal dalam mengamankan *support* Internasionalnya dalam konflik yang terjadi (Nainggolan 2014).

Berbanding terbalik dengan kelompok gerakan separatis yang ada di Papua, yang semakin gencar dalam mencari simpatisan dan empati dari masyarakat global terhadap konflik yang terjadi di Papua. Kegagalan pemerintah dilihat sebagai hal yang sangat menguntungkan bagi kelompok separatis dalam mengumpulkan dukungan terhadap Papua. Banyak aktor-aktor penting dalam adanya gerakan separatis Papua yang akhirnya mencari suaka di luar negeri serta berani menyuarakan isu-isu Papua ke dalam forum-forum Internasional, serta ke negara-negara lain. Alhasil, hingga saat ini dapat dilihat masih banyak pendukung dari negara-negara lain hingga forum-forum Internasional yang menuntut adanya separatisme wilayah Papua dari NKRI (Nainggolan 2014).

Hal ini lah yang menjadi tanggung jawab besar bagi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam konteks

mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari ancaman-ancaman eksternal. Melalui Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data yang dimiliki oleh BSKLN Kemlu Republik Indonesia bergerak dalam mengumpulkan data-data terkait yang diperlukan.

3.3 Pengaruh Internasional yang Mendukung Gerakan Separatis Papua

Dalam membahas gerakan separatisme yang terjadi di Papua, kelompok separatis yang ada memiliki segudang upaya dalam memenangkan peperangan kemerdekaan ini dengan Pemerintah Indonesia hingga saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kelompok gerakan separatis yang memberikan *outcome* yang baik kepada kelompok separatis adalah dengan melakukan strategi Internasionalisasi gerakan separatis yang ada di Papua. Internasionalisasi gerakan separatis Papua merupakan suatu strategi yang digunakan oleh kelompok separatis dalam menarik simpatisan-simpatisan internasional dan rasa empati masyarakat global dalam membantu Papua untuk memisahkan dirinya dari wilayah NKRI. Kampanye atau protes internasional gerakan separatis di Papua merupakan strategi diplomasi yang digunakan sebagai bentuk keterbatasan kelompok separatis dalam melakukan strategi perlawanan fisiknya dengan Pemerintahan Indonesia yang gencar dalam aksi pendekatan militer, di mana diplomasi sendiri dapat dilihat sebagai kelanjutan dari perang dalam bentuk yang berbeda (Nainggolan 2014).

Kampanye-kampanye internasional yang bersifat propaganda dengan penggunaan media komunikasi yang bervariatif merupakan upaya

manipulatif yang dilakukan oleh kelompok separatis. Kampanye internasional yang dilakukan oleh kelompok gerakan separatis di Papua juga seringkali mengalami periode pasang surut seiring dengan kapasitas atau kemampuan aktor-aktor serta dukungan simpatisan yang ada yang mempengaruhi opini-opini masyarakat global yang terkadang masih menjadi kendala bagi kelompok separatis. Namun selagi dengan adanya penyiaran terkait kampanye-kampanye internasional yang dilakukan maka akan terus ada masyarakat global yang akhirnya termanipulasi dan terpantik untuk memberikan opini-opini nya dan menjadi simpatisan dari gerakan separatis yang ada (Nainggolan 2014).

Hingga saat ini aktor-aktor diplomasi dari gerakan separatis Papua makin bervariatif mulai dari adanya individu, organisasi, kelompok, lembaga swadaya masyarakat, negara dan kumpulan negara, hingga ke organisasi regional maupun multilateral sudah berhasil dijamah oleh strategi internasionalisasi gerakan separatis Papua (Nainggolan 2014). Ada begitu banyak aktor individu yang tercatat sebagai tokoh yang aktif melakukan kampanye dan menarik simpatisan dari lingkup global hingga ke forum-forum global seperti misalnya Herman Wanggai, Socrates Sofyan Nyoman, Benny Wenda dan Theys Eluay (Nainggolan 2014). Aktor individu tersebut bahkan sampai mendapat tempat untuk menetap dan bahkan ada yang telah menjadi warga negara asing di tempat mereka menetap saat ini tersebar di negara-negara Eropa, Australia hingga ke Amerika Serikat. Mereka hingga saat ini masih aktif melakukan kampanye-kampanye internasional dan bahkan ke forum-forum global demi menuntaskan tujuan utama mereka

untuk membantu gerakan separatis di Papua hingga akhirnya dapat memerdekakan Papua.

Tak hanya aktor individu, LSM, organisasi atau kelompok, ternyata hingga saat ini sudah ada negara-negara yang tercatat secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, mendukung adanya gerakan separatisme yang ada di Papua. Negara-negara yang tercatat pernah menjadi simpatisan dari adanya gerakan separatis di Papua antara lain Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, Vanuatu, Selandia Baru, Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan masih banyak lagi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Indonesia terutama Kementerian Luar Negeri sebagai garda terdepan instansi yang berfokus pada urusan luar negeri untuk dapat membantu menanggulangi permasalahan ini dan mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia.

Tabel 1.4 Data-data yang dihimpun oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terkait pemetaan persebaran kelompok/aktor/negara simpatisan gerakan separatis Papua

No.	Negara/ Aktor	Kelompok/Individu/NGO	Kegiatan	Tautan	Keterangan
1.	Amerika Serikat	ETAN (*East Timor and Indonesia Action Network*)	Menjalankan kampanye yang mendukung gerakan separatis dan kemerdekaan Papua	Jurnal Nainggolan 2014	Organisasi ini memiliki visi ingin mendukung kemerdekaan Papua setelah berhasil mendukung kampanye kemerdekaan Timor-Timur.

2.	Amerika Serikat	MNAA-CA (*Moana Nui Action Alliance-California*)	Mendukung kampanye kemerdekaan Papua.	Jurnal Nainggolan 2014	Sesuai dengan tujuan politik mereka serta *Human Rights Watch* (HRW) dan *Amnesty International* (AI) yang fokus pada pelanggaran HAM.
3.	Canada	WESTPAN atau *West Papua Action Network*	Mendukung perjuangan masyarakat Papua Barat dalam mendapatkan kembali hak-hak asasi manusia mereka, termasuk juga dalam hak nasib penentuan diri. WESTPAN sangat mendukung aspirasi dari masyarakat Papua Barat untuk menentukan masa depan mereka sendiri.	http://www.westpapua.ca/	WESTPAN juga berperan dalam melobi secara nasional maupun internasional terkait solusi perdamaian, seperti "*Zone of Peace*" di Papua review PBB tahun 1969 terkait "*Act of Free Choice*" dan dialog terbuka antara Papua dan Pemerintah Indonesia.
4.	Inggris	*Free West Papua Campaign* (FWPC)	Aktivitas kampanye Papua Merdeka.	Jurnal Nainggolan 2014	Menjadikan Inggris sebagai pusat gerakannya sejak tahun 2004, eks-pelarian OPM untuk menjadi warga negara

					Inggris, membuka kantor separatis Papua sebagai perwakilan FWPC di Oxford pada tanggal 8 Mei 2013. Memperluas jaringan kantornya hingga ke Den haag, Belanda, Port Moresby, PNG, dan Perth, Australia.
5.	Inggris	*International Parliamentarians for West Papua* (IPWP)	Melalui penggunaan media sosial twitter, dan juga website https://freewestpapua.org dan https://bennywenda.org wenda mengupdate secara rutin perkembangan eskalasi kekerasan di Papua.	Jurnal Nainggolan 2014	Melalui penggunaan media sosial twitter, dan juga website https://freewestpapua.org dan https://bennywenda.org wenda mengupdate secara rutin perkembangan eskalasi kekerasan di Papua. dan juga aktif melakukan kampanye tulisan ke media internasional yang progresif, seperti The Guardian pada 28 April 2014.

Terlihat dari tabel yang disajikan bahwasanya ada banyak negara-negara besar yang memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik dengan Indonesia ternyata membantu kelompok separatis dan gerakan separatis yang ada yang dari awal kemerdekaan Indonesia pemerintah coba selesaikan konflik demi menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Hal-hal seperti ini sudah seharusnya menjadi perhatian besar bagi pemerintah Indonesia untuk lebih sigap dalam menjaga keutuhan NKRI mengingat bahwasanya isu separatis yang terjadi di Papua merupakan isu rumah tangga bangsa Indonesia yang seharusnya tidak dicampuri oleh pengaruh internasional. Negara-negara yang tercatat pada tabel tersebut seperti Amerika Serikat, Inggris dan Kanada merupakan negara-negara besar yang memiliki hubungan diplomasi yang baik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun menyimpan gerakan serta secara diam-diam maupun terang-terangan memberikan rasa empatinya terhadap gerakan separatis yang ada di Papua. Hal ini menjadi perhatian besar bagi Pemerintah Indonesia dalam mengamankan hubungan diplomasinya dengan negara-negara yang ada serta menguatkan kedaulatan bangsa Indonesia di tingkat global.

Pemerintahan Indonesia seharusnya sudah lebih bisa mematangkan strategi dan juga upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meredam konflik yang terjadi. Pengaruh Internasional adalah faktor besar yang seharusnya bisa diselesaikan oleh pemerintah, mengingat Pemerintah Indonesia memiliki instansi khusus yang mengurusi urusan-urusan internasional bangsa Indonesia dan mampu dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan

bangsa Indonesia yaitu melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dibantu dengan adanya jalinan diplomatik yang dimiliki yang dibantu oleh Kedutaan-Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang tersebar di seluruh dunia.

3.4 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia *Act of Preventing*

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berperan sebagai instansi pemerintah yang berfokus pada urusan serta agenda nasional bangsa Indonesia dalam lingkup global memiliki peranan penting dalam membantu menanggulangi serta meredam adanya konflik separatisme yang terjadi. Sejak tahun 2023 ini dengan adanya Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri atau BSKLN mencoba membantu merekomendasikan kebijakan-kebijakan atau strategi langkah dalam upaya menjaga kedaulatan Republik Indonesia dan meredam konflik separatisme yang terjadi di Papua hingga saat ini.

Melalui pusat kajian yang dimiliki oleh BSKLN yaitu Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data yang baru saja diresmikan pada tahun 2021 melalui Permenlu No. 6 Tahun 2021, mencoba mengkaji lebih dalam konflik separatisme yang terjadi di Papua hingga nantinya dapat merekomendasikan kebijakan serta strategi atau langkah-langkah preventif dalam mengatasi konflik separatisme yang ada di Papua. Namun sebelum akhirnya suatu rekomendasi kebijakan dikeluarkan perlu adanya tahapan-tahapan analisis yang harus dipenuhi dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan agar rekomendasi kebijakan yang diberikan dapat tepat sasaran dan akhirnya bisa dijadikan kebijakan yang dapat diimplementasikan.

Sebagai pusat kajian yang khusus membahas mengenai isu-isu khusus yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan pusat analisis data, studi kasus gerakan separatis yang terjadi di Papua merupakan salah satu isu khusus yang ditangani oleh SK IKAD saat ini. SK IKAD mencoba membantu pemerintah dengan mengkaji isu bersama dengan staff diplomat serta data analyst yang dimiliki untuk mencoba mendalami serta memahami isu yang ada berdasarkan fakta dan data yang ada yang kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya yang sekiranya dibutuhkan dalam merumuskan suatu rekomendasi kebijakan.

Dalam studi kasus gerakan separatis yang terjadi di Papua pada saat ini dan berdasarkan pengamatan dari penulis ketika melaksanakan praktik kerja lapangan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun ini selama periode Februari-April 2023, Pusat SK IKAD telah melaksanakan tiga langkah-langkah preventif yang dirasa perlu dilakukan dalam membantu merumuskan suatu rekomendasi kebijakan yang strategis. Yang pertama adalah dengan mengadakan webinar **Bincang Data "Papua Pasca Otsus 2021: *What is Our Next Agenda*?"** yang diadakan pada tanggal 24 Februari 2023 melalui platform *Zoom Meeting* yang dihadiri oleh seluruh Kedutaan Besar Republik Indonesia di segala penjuru dunia untuk meningkatkan pemahaman serta menjaring masukan terkait peranan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri pasca Otonomi Khusus Papua dalam membantu meningkatkan pelaksanaan diplomasi kedaulatan Republik Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri.

Dalam webinar yang diadakan, demi meningkatkan pengetahuan terkait dengan update-an hal-hal atau strategi yang terjadi di Papua saat ini kepada seluruh KBRI dan KJRI yang ada di seluruh dunia, Pusat SK IKAD BSKLN Kementerian Luar Negeri mengundang dua pembicara yang ekspert di bidangnya. Pembicara pertama adalah **Dr. Arie Ruhyanto** yang membawa topik materi yang berjudul **Pemekaran Papua; *Buying Peace or Fueling Conflict*?"** Dalam materi pertama tersebut banyak membahas terkait dengan kebijakan pemekaran Papua yang sedang diimplementasikan saat ini apakah akan berdampak baik atau lebih memperkeruh konflik yang sudah ada di Papua pada saat ini. Namun dalam pemaparan materi dari hasil analisa yang dilakukan oleh Dr. Arie Ruhyanto dalam menilik kebijakan Pemekaran Papua sebagai salah satu strategi dalam meredam konflik separatis yang terjadi memiliki dampak baik dan buruk sekaligus. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan lagi dalam menyukseskan strategi ini agar dapat mengurangi frekuensi konflik yang ada.

Materi kedua pada webinar tersebut disampaikan oleh **Mardyanto Wahyu Tryatmoko** yang membawa topik yang berjudul **"Percepatan Pembangunan Papua: Harapan dan Tantangan"**. Dalam materi kedua kali ini banyak membahas mengenai tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan Papua yang saat ini sedang digencar-gencarkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya mempertahankan kedaulatan NKRI dari konflik isu separatisme yang terjadi di Papua. Pada saat pelaksanaan webinar tersebut penulis berkesempatan untuk membantu melaksanakan kegiatan sebagai operator dimana penulis membantu men-

spotlight para pembicara dan menjadi notula selama acara berlangsung dan juga membantu men-capture sesi foto bersama dalam Zoom Meeting tersebut. Webinar yag diadakan oleh SK-IKAD itu dihadiri oleh hampir 100 peserta yang terdiri dari seluruh perwakilan KBRI dan KJRI yang ada di seluruh dunia,

Tak hanya mengagendakan webinar sebagai wadah dalam membagikan materi dan informasi terkini terkait konflik separatisme yang ada di Papua berdasarkan pengamatan dan tugas yang diterima oleh penulis ketika melaksanakan praktik kerja lapangan di Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Luar Negeri melalui BSKLN terkhusus Pusat SK IKAD membuat pamflet khusus terkait dengan narasi-narasi dan informasi Papua yang ada saat ini sehingga seluruh KBRI dan KJRI yang tersebar diseluruh dunia memiliki narasi dan informasi yang sama terkait Papua pada saat ini, yang sayangnya pamflet tersebut tidak dibagikan secara luas sehingga masyarakat tidak mengetahui isi dari pamflet tersebut. Sayangnya juga, penulis beserta rekan sesama praktik kerja lapangan di SK-IKAD belum berkesempatan untuk melihat dan membaca isi dari pamflet tersebut mengingat sebenarnya bahwasanya isu separatisme yang ada di Papua ini merupakan salah satu isu atau topik rahasia yang ditangani oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Langkah lain yang dilakukan oleh Pusat SK IKAD BSKLN Kementerian Luar Negeri adalah dengan membuat Bank Data terkait dengan negara/individu/organisasi/kelompok simpatisan gerakan separatis Papua yang tersebar di seluruh dunia guna untuk memudahkan pemetaan

pergerakan kelompok gerakan separatis Papua yang masih aktif melakukan kampanye propaganda dalam lingkup global demi mencapai tujuan Papua merdeka. Bank Data tersebut tersaji dengan data negara di seluruh dunia yang memiliki aktivitas yang mendukung adanya gerakan separatis Papua, yang sebagian dari datanya tersaji pada Tabel 1.1 penelitian ini. Pemetaan yang dilakukan oleh Pusat SK IKAD akan sangat berguna dalam membantu memberikan data yang valid terkait alur pergerakan kelompok separatis yang ada di lingkup global yang kemudian Pusat SK IKAD BSKLN Kementerian Luar Negeri dapat melaporkan data tersebut dan merumuskan suatu rekomendasi kebijakan strategis yang diharapkan dapat tepat sasaran nantinya dan dapat diimplementasikan dengan harapan dapat membantu meredam dan menyelesaikan konflik separatisme yang terjadi di Papua dari sektor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

3.5 Analisis Peran Kementerian Luar Negeri dalam *Theory and Practice*

3.5.1 Staffing and supporting missions abroad

Pada peran terkait dengan *staffing and supporting missions abroad* dijelaskan bahwasanya Kementerian Luar Negeri memiliki peran dalam menyediakan personel-personel atau anggota untuk kepentingan diplomatik nasional ataupun dalam menjalankan misi konsulat yang ada di luar negeri (Berridge, 2010). Hal ini juga termasuk dalam memiliki pusat organisasi internasional yang permanen diluar negeri. Dalam pelaksanaan peran tersebut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah memenuhi fungsi tersebut

dimana Kementerian Luar Negeri RI memiliki staff atau diplomat yang bekerja dan mengabdi pada negeri di luar negeri maupun di Indonesia dalam menangani segala isu yang ada yang sedang dihadapi termasuk dengan isu separatisme yang ada di Papua. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pula juga telah memenuhi tanggung jawab dan fungsinya dalam memiliki kantor representasi negara Indonesia dalam bentuk Kedutaan Besar Republik Indonesia dan juga Konsulat Jendral Republik Indonesia.

Dalam konteks isu separatisme yang ada di Papua ini juga, para staf dan diplomat yang bekerja dan mengabdi di luar negeri menjadi representatif dan garda terdepan dalam membela kedaulatan Indonesia telah memenuhi tugasnya dengan baik dan dapat terlihat bedasarkan pengamatan penulis dan apa yang penulis kerjakan selama melaksanakan praktik kerja lapangan ketika BSKLN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang membahas terkait dengan isu Papua dimana seluruh KBRI dan KJRI yang ada menghadiri pertemuan yang di adakan melalui platform Zoom dan turut aktif berdiskusi dalam membahas terkait strategi yang dapat disusun bersama dalam mengatasi isu separatisme yang ada di Papua. Hal ini menurut penulis sudah sesuai dengan peranan yang dijelaskan oleh Berridge dalam bukunya yaitu menunjukkan komitmen serta kesungguhan Kementerian Luar Negeri termasuk dengan staf dan perwakilan yang ada di dalamnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.5.2 Policy Advice and Implementation

Seperti yang diketahui sebelumnya, Kementerian Luar Negeri sebagai salah satu instansi pemerintahan berperan sangat penting dan memiliki langkah yang

sangat terstruktur serta hati-hati dalam menegaskan serta mengupayakan prinsip geografis dalam manajemen internalnya. Dalam mengatasi serta menghadapi isu separatisme Papua yang sedang terjadi, Kementerian Luar Negeri menggunakan cara yang sangat terstruktur serta hati-hati dalam proses perumusan kebijakan yang nantinya akan digunakan dalam membantu mengatasi isu separatisme yang ada di Papua di mana Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memiliki departemen atau badan pendukung dibawahnya yang berfungsi dan bertanggung jawab dalam melakukan riset termasuk dalam pengumpulan data dan analisis yaitu Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) (Berridge 2010). Dijelaskan pula dalam buku tersebut terdapat 2 departemen yang memiliki peranan penting yakni departemen geografis yang lebih membahas dan terfokus dalam pembahasan kawasan-kawasan serta departemen fungsional yang terfokus dalam isu-isu umum yang sedang terjadi seperti perubahan iklim, HAM, narkoba dan kejahatan internasional, keamanan energi dan juga migrasi serta pengungsi (Berridge, 2010).

Sesuai dengan fungsi sebagai pemberi rekomendasi atau saran kebijakan dan yang pula mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam hal ini BSKLN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai pengamatan serta pekerjaan yang penulis laksanakan mulai dari tugas pembuatan *policy brief* serta tugas-tugas lain yang berupa penyajian data yang dibutuhkan dalam merumuskan suatu kebijakan baru. Lalu, apabila berbicara terkait isu atau konflik separatisme Papua BSKLN Kementerian Luar Negeri Indonesia dibantu oleh pusat pendukungnya yang dalam hal ini Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data dalam membantu merumuskan rekomendasi kebijakan serta strategi yang dibutuhkan serta mengimplementasikan hal-hal tersebut dan

memastikan hal-hal tersebut berjalan secara efektif dimana jika dilihat dari penjelasan buku tersebut Pusat SK-IKAD dapat digolongkan menjadi departemen fungsional yang membahas terkait dengan isu-isu khusus yang ada yang sedang dihadapi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia yang dalam hal ini adalah isu separatisme yang ada di Papua. Hal ini dapat dibuktikan dengan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan diperlukannya data-data faktual dan terkini terkait dengan isu yang dibahas dimana Pusat SK-IKAD pada waktu itu melakukan riset dan pengumpulan data terkait dengan individu, organisasi, hingga negara-negara yang mendukung gerakan separatisme yang ada di Papua yang dikhawatirkan dapat mengancam kedaulatan bangsa Indonesia. Lalu dari data tersebut akhirnya diolah menjadi sebuah bank data yang dapat digunakan oleh BSKLN dalam merumuskan suatu rekomendasi kebijakan strategis. Dari bank data tersebut implementasi yang dilakukan oleh BSKLN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia adalah dengan membuat sebuah buklet yang berisi terkait dengan informasi Papua yang dibagikan dan disebarkan kepada seluruh KBRI dan KJRI yang ada di dunia agar mereka memiliki narasi yang sama terkait dengan isu Papua. Lalu, implementasi lanjutan yang dilakukan adalah dengan mengundang seluruh KBRI dan KJRI yang ada dalam membahas terkait dengan strategi lanjutan yang dapat dilakukan dalam membantu meredam isu separatisme yang ada di Papua.

3.5.3 Policy Coordination

Kementerian Luar Negeri untuk saat ini tidak memiliki wewenang yang besar seperti dahulu dalam menjalankan hubungan luar negeri secara langsung karena dengan perkembangan zaman dan politik yang ada saat ini tidak sedikit negara dengan struktur pemerintahan dan departemen yang ada di dalamnya yang memiliki peran khusus dalam menangani isu luar negerinya secara langsung seperti Amerika Serikat (Berridge, 2010).

Dalam konteks *Policy Coordination* terkait isu separatisme yang ada di Papua serta strategi preventif yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tidak banyak melakukan koordinasi dengan negara terkait atau organisasi internasional terkait dalam membantu melacak serta menangani organisasi atau kelompok, individu serta negara asing yang mendukung adanya gerakan separatisme yang ada di Papua. Selama periode praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh penulis, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia hanya bekerja sama dan dekat dengan perwakilan-perwakilan Republik Indonesia yang ada di dunia yaitu melalui KBRI serta KJRI dalam melaksanakan strategi preventif dan membantu meredam isu separatisme Papua yang telah menjalar ke konteks internasional. Hal ini sangat disayangkan karena akan lebih efektif lagi apabila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia lebih melebarkan sayap strategi preventifnya dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia terkait dengan isu separatisme Papua dengan menjalankan kerja sama dengan negara-negara terkait dalam membantu mencegah luasnya dukungan internasional terkait separatisme yang ada di Papua.

3.5.4 Dealing with foreign diplomat at home

Dalam peranan Kementerian Luar Negeri kali ini lebih membahas terkait dengan peran diplomat dalam mengumpulkan informasi dan memiliki kapasitas intrik yang menjadikan Kementerian Luar Negeri harus lebih berhati-hati terkait dengan diplomat atau representasi negara lain yang berkunjung dalam menjaga keamanan (Berridge, 2010).

Dalam konteks strategi preventif yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam menangani isu separatisme Papua selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan pada tahun 2023 tersebut, Kementerian Luar Negeri tidak banyak melaksanakan peranannya sesuai dengan yang dijelaskan. Padahal akan lebih efektif lagi tindakan preventif Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia apabila Kementerian bersama dengan BSKLN melakukan diskusi intensif bersama dengan perwakilan dari negara-negara yang dicurigai memiliki atau menampung organisasi yang mendukung adanya gerakan separatisme yang ada di Papua. Lalu, selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Pusat SK-IKAD, penulis belum pernah melihat dan diikutsertakan dalam diskusi ataupun rapat yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan perwakilan dari negara-negara atau organisasi luar yang ada di Indonesia dalam membahas atau menangani suatu isu yang ingin diselesaikan bersama namun penulis mengetahui bahwasanya Pusat SK-IKAD dalam melaksanakan tugasnya menyajikan data yang diperlukan untuk membuat atau merekomendasikan suatu kebijakan masih menggunakan bantuan vendor yang didapatkan dari Singapura untuk membantu memberikan dan meng-update data-

data terkini yang dibutuhkan oleh BSKLN dan Pusat SK_IKAD saat ingin merekomendasikan atau merumuskan suatu kebijakan.

3.5.5 Building domestic support

Dalam peranan *building domestic support* dimana Kementerian Luar Negeri sangat membutuhkan dukungan-dukungan domestik baik itu dari masyarakat, struktur pemerintahan hingga ke media dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Berridge, 2010). Dalam konteks Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam mengatasi isu separatisme yang ada di Papua telah memenuhi peranan tersebut dimana hal ini dapat terlihat ketika diadakannya diskusi besar-besaran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Pusat SK IKAD BSKLN bersama dengan seluruh KBRI serta KJRI yang ada di dunia melalui *platform Zoom Meeting* dengan tajuk **Bincang Data "Papua Pasca Otsus 2021: *What is Our Next Agenda*?"** pada 24 Februari 2023.

Pada agenda tersebut dukungan domestik yang di dapatkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia datang dari para akademisi dan ilmuwan yang pada saat itu memberikan webinar terkait informasi-informasi faktual yang ada dan mereka alami selama di Papua dalam menganalisis isu serta menentukan strategi serta langkah yang efektif dalam menyelesaikan isu separatisme yang ada di Papua. Namun selama periode praktik kerja lapangan yang penulis laksanakan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tidak banyak bekerja sama dengan rekan media atau pemerintahan daerah dalam mendalami analisis lebih dalam terkait dengan isu separatisme yang ada di Papua.

3.5.6 Hasil Analisis Teori

Dari ke 5 fungsi dan peranan penting Kementerian Luar Negeri sesuai dengan buku *Diplomacy: Theory and Practice* dapat disimpulkan bahwasanya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia di mata dunia telah melaksanakan fungsinya dengan semaksimal mungkin.

Namun, jika berbicara terkait dengan isu separatisme yang ada di Papua yang saat itu hingga sekarang sedang ditangani oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui badan yang ada didalamnya yaitu BSKLN masih kurang maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ada beberapa poin peranan yang telah dijelaskan di buku yang pada fakta lapangannya masih belum dilaksanakan secara maksimal oleh BSKLN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menjadikan isu separatisme yang ada di Papua ini menjadi isu dan permasalahan besar yang tidak berkesudahan yang ditangani oleh Pemerintah Indonesia. Diharapkan kedepannya BSKLN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dapat secara maksimal melaksanakan fungsi dan peranannya agar kedepannya masalah-masalah domestik ataupun internasional yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia saat ini dan kedepannya dapat diselesaikan secara efektif dan maksimal.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Gerakan separatis yang terjadi di Papua merupakan sebuah konflik berkepanjangan yang dialami oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan banyak cara dalam menghadapi konflik yang terjadi. Kementerian Luar Negeri sebagai salah satu instansi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab, tugas dan fungsi yang salah satunya dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Melalui buku Diplomacy: Theory and Practice pada tahun 2010, Berridge menjelaskan terkait dengan fungsi dan peranan penting dari Kementerian Luar Negeri yang seharusnya dilakukan agar dapat bertanggungjawab serta bertugas secara maksimal.

Kementerian Luar Negeri sebagai aktor instansi pemerintah yang berfokus pada segala urusan-urusan luar negeri juga turut andil membantu menyelesaikan konflik separatisme yang ada. Melalui badan lingkup yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri yaitu BSKLN atau Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri terus mengupayakan pendekatan strategi yang dapat dilakukan dalam membantu mengatasi konflik. Pusat SK IKAD merupakan salah satu Pusat kajian yang dimiliki oleh BSKLN yang saat ini sedang menanggulangi isu separatisme yang terjadi dengan mencoba merumuskan rekomendasi kebijakan dengan langkah-langkah dan pendekatan yang tepat. Pendekatan atau langkah-

langkah yang dilakukan adalah seperti mengadakan webinar dalam upaya penyaluran informasi terkini kepada seluruh KBRI dan KJRI yang ada di dunia, pembuatan pamflet Papua yang berisikan segala informasi yang ada saat ini tentang konflik yang terjadi, hingga membuat bank data terkait pergerakan kelompok separatis yang ada di lingkup global.

Namun pendekatan serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang dalam hal ini dibantu oleh BSKLN masih dinilai kurang maksimal dalam melaksanakan fungsinya sehingga isu separatisme yang ada di Papua tidak dapat diredam dan diselesaikan secara efektif dan menjadikan permasalahan tersebut masih berlanjut hingga detik ini.

4.2 Rekomendasi

4.2.1 Rekomendasi kepada BSKLN

Adapun rekomendasi yang dapat peneliti berikan terkait dengan penelitian dan pembuatan kebijakan selanjutnya adalah:

1. Apabila akan ada penelitian lanjutan setelah penelitian ini akan lebih baik mencoba melihat konflik yang terjadi dari sisi kebijakan atau langkah yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia termasuk Kementerian Luar Negeri apakah mencapai goals atau tujuan yang ingin dicapai. Dikarenakan pada penelitian ini, langkah yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri saat ini hanya sebagai pendekatan-pendekatan yang dibutuhkan sebelum akhirnya dapat

merumuskan rekomendasi kebijakan yang strategis dan dapat diimplementasikan dengan baik

2. Rekomendasi kebijakan yang lebih mengutamakan pendekatan diplomasi dan dialog-dialog konstruktivis terkait dengan isu dan konflik yang terjadi merupakan salah satu pilihan strategis bagi Kementerian Luar negeri untuk secara perlahan dapat memenangkan konflik separatis yang terjadi di Papua saat ini secara perlahan-lahan.

4.2.2 Rekomendasi Kegiatan Praktik Kerja

Dalam praktik kerja kali ini, penulis sangat merekomendasikan adanya kerjasama project eksklusif yang dapat dilakukan bersama antara instansi terkait yaitu Kementerian Luar Negeri dan peserta praktik kerja agar ada output yang dapat dilihat bersama yang dapat berguna tak hanya bagi kedua belah pihak namun juga kepada masyarakat nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Afriandi, Djon. 2015. "The Indonesian coin strategy: failures and alternative approaches in overcoming the Papuan insurgency." *Institutional Archive of the Naval Post Graduate School*, (December), 1-110.

Badan Intelijen Negara. 2014. *Menyongsong 2014 – 2019: Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah.* Jakarta: CV Rumah Buku.

Berridge, G.R. 2010. *Diplomacy: Theory and Practice*. N.p.: Palgrave Macmillan.

Clausewitz, Carl v. 1984. *On War*. Edited by Peter Paret, Michael Howard, and Bernard Brodie. Translated by Michael Howard, Bernard Brodie, and Peter Paret. N.p.: Princeton University Press.

Ismanto, Tri Y. 2019. "WINNING THE PAPUANS' "HEARTS AND MINDS": ANALYZING THE INDONESIAN STRATEGY TO COUNTER THE PAPUAN INSURGENCY." *Institutional Archive of the Naval Post Graduate School*, (December), 1-156.

Kementerian Luar Negeri. 2022. "Laporan Kinerja Tahun 2022, Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data." Kemlu. https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0JQUEsvMjAyMi8yMDIzMDExOV9MYXBvcmFuJTIwS2luZXJqYSUyMFB1c2F0JTIwU0slMjBJS0FEJTIwVGFodW4lMjAyMDIyX0ZpbmFsJTIwKDEpJTIwKDEpLnBkZg==.

Mardiani, Indah P., Ismi Anisah, Marlina Hasibuan, and Nur Fadilah. 2021. "Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis di Papua."

Jurnal Nasional Indonesia 1, no. 2 (Februari): 1-9. https://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/12/25.

Mukhtadi. 2021. "STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN GERAKAN SEPARATIS PAPUA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA." *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 7 (2): 1-10.

Nainggolan, Poltak P. 2014. "Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua." *Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan* 19, no. 3 (September): 1-20. https://doi.org/10.22212/kajian.v19i3.555.

Sabir, Ahmad. 2018. "Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua." *Jurnal Hubungan Internasional*, no. 1 (Juni), 1-18.

LAMPIRAN

1. *Tour* Kementerian Luar Negeri yang dilaksanakan dengan tujuan agar memperkenalkan lingkungan kerja Kementerian Luar Negeri kepada peserta praktik kerja periode Februari hingga April 2023.

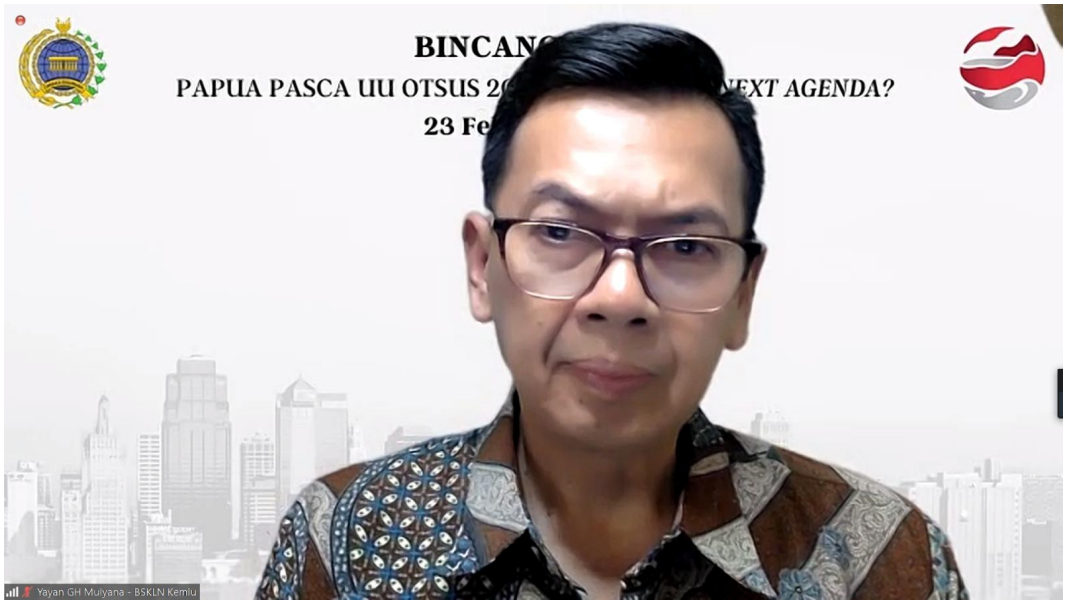


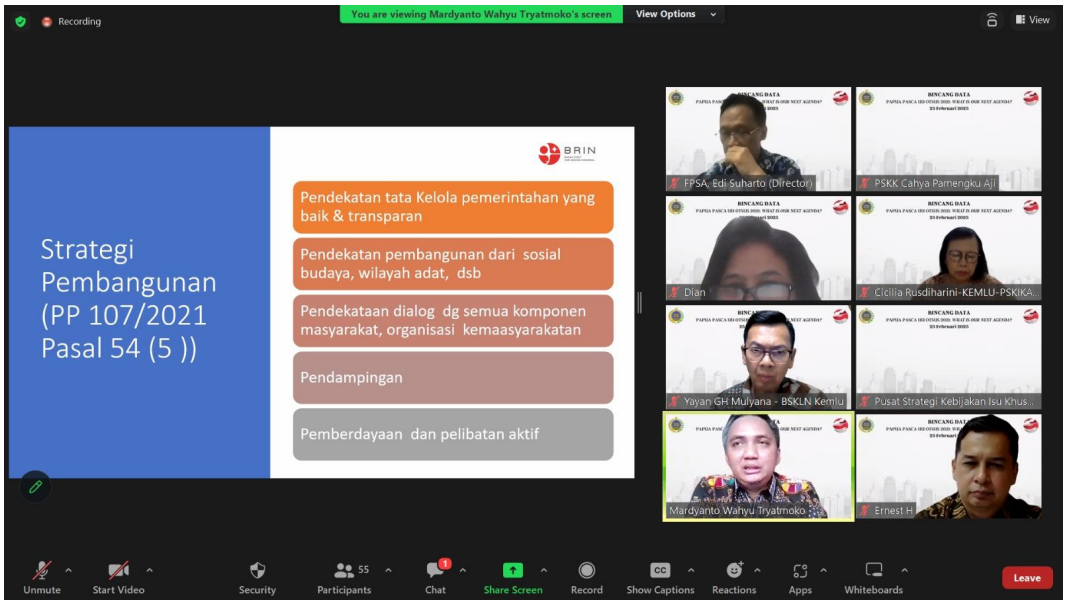


2. *Event Coordinating* penerimaan dua duta yang baru menyelesaikan masa tugasnya di luar negeri dan kembali ke tanah air dan bergabung dengan Pusat SK IKAD



3. Bincang Data Khusus Papua merupakan suatu webinar yang memiliki judul lengkap **Bincang Data "Papua Pasca Otsus 2021: *What is Our Next Agenda*?"** yang diadakan pada 24 Februari 2023 yang dihadiri oleh duta besar dari seluruh KBRI dan KJRI di dunia.


BINCANG
PAPUA PASCA UU OTSUS 20
EXT AGENDA?
23 Fe
Yayan GH Mulyana - BSKLN Kemlu


Recording
You are viewing Mardyanto Wahyu Tryatmoko's screen
View Options
View
Strategi Pembangunan (PP 107/2021 Pasal 54 (5))
BRIN
Pendekatan tata Kelola pemerintahan yang baik & transparan
Pendekatan pembangunan dari sosial budaya, wilayah adat, dsb
Pendekatan dialog dg semua komponen masyarakat, organisasi kemaasyarakatan
Pendampingan
Pemberdayaan dan pelibatan aktif
FPSA, Edi Suharto (Director)
PSKK Cahya Pamengku Aji
Dian
Cicilia Rusdiharini-KEMLU-PSKIKA...
Yayan GH Mulyana - BSKLN Kemlu
Pusat Strategi Kebijakan Isu Khus...
Mardyanto Wahyu Tryatmoko
Ernest H
Unmute
Start Video
Security
Participants
55
Chat
Share Screen
Record
Show Captions
Reactions
Apps
Whiteboards
Leave